

**PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Triwulan II - 2007

**Kantor Bank Indonesia
Batam**

KATA PENGANTAR

Pada Triwulan II 2007 telah banyak peristiwa yang mempengaruhi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa peristiwa penting yang tercatat antara lain penurunan BI-Rate, ditetapkannya Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone dan beberapa peristiwa lainnya yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah ini.

Berdasarkan PDRB, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 tumbuh sebesar 5,13%. Ini memberikan sinyal positif terhadap perkembangan ekonomi kedepan. Ekspektasi ini didukung oleh perkembangan fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau yang terlihat dari pertumbuhan kredit pada triwulan II 2007 sebesar 7,68%.

Berkaitan dengan semakin pentingnya kontribusi perekonomian daerah di era otonomi daerah, Bank Indonesia secara teratur melakukan kajian ekonomi regional yang terbit secara rutin setiap triwulanan dalam bentuk analisa Perkembangan Ekonomi Daerah (PEKDA). Analisa mencakup bidang perekonomian, perbankan dan keuangan daerah.

Kajian ini diperuntukkan bagi kebutuhan analisa perekonomian secara nasional oleh Kantor Pusat Bank Indonesia. Selain itu, sejalan dengan fungsi KBI Batam sebagai partner pembangunan bagi Pemerintah Daerah, hasil kajian secara rutin disampaikan kepada stakeholder di daerah.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ini kami mengucapkan terima kasih.

Batam, Agustus 2007

ttd

Irwan Lubis
Pemimpin

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 Perkembangan Ekonomi Makro Kepulauan Riau	5
1.1. Kondisi Umum	5
1.2. Perkembangan Penduduk	10
1.3. Indeks Pembangunan Manusia	12
1.4. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau	14
1.5. Perkembangan Tenaga Kerja	15
1.6. Perkembangan Pariwisata	16
1.7. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	17
1.8. Perkembangan Pedagang Valuta Asing (PVA)	18
1.9. Pendapatan per Kapita Penduduk	19
1.10. Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Kerja Batam	27
BAB 2 Perkembangan Inflasi	29
2.1. Kondisi Umum	29
2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Tahunan (yoy) Batam	31
2.3. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	32
BAB 3 Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran	34
3.1. Kondisi Umum	34
3.2. Moneter	34
3.3. Perbankan	36
3.4. Perkembangan Bank Syariah	44
3.5. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	47
3.6. Perkembangan Sistem Pembayaran	50
3.7. Lalu Lintas Pembayaran Giral	51
BAB 4 Keuangan Daerah Periode Tahun 2007	54
4.1. Kondisi Umum	54
4.2. APBD Kota Batam	55
4.3. APBD Kota Tanjung Pinang	56
4.4. APBD Kabupaten Karimun	57
4.5. APBD Kabupaten Bintan	57
4.6. APBD Kabupaten Lingga	58
4.7. APBD Kabupaten Natuna	58
4.8. Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam	58
BAB 5 Prospek Perekonomian Daerah	60
5.1. Prospek Ekonomi Makro	60
5.2. Prospek Inflasi	62

- Boks 1. Survey Indeks Harga Properti Residensial di Kota Batam Trw II-2007
- Boks 2. Menyambut Free Trade Zone (FTZ) Batam
- Boks 3. Wacana Pembubaran Otorita Batam
- Lampiran

PERKEMBANGAN EKONOMI

Perkembangan perekonomian serta kinerja perbankan selama triwulan I tahun 2007 memberikan persepsi positif pada keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah di triwulan II tahun 2007. Di samping itu, upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong peranan sektor unggulan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kontribusi Provinsi Kepulauan Riau terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (HPR) serta sektor industri pada triwulan II-2007 diperkirakan masih terus berlangsung pada sampai dengan akhir tahun 2007.

Sampai dengan triwulan II-2007, kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tumbuh cukup baik. Sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi meskipun distribusi terbesar masih tetap disumbangkan oleh sektor industri. Sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor industri non-migas, diikuti oleh sektor pertambangan yang masing-masing mencapai 59,74% dan 10,33%.

INFLASI

Selama triwulan II-2007 (April – Juni) inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kota Batam sebesar -0,35%. Pada bulan April dan Mei terjadi deflasi masing-masing sebesar -0.03% dan -0.35%, namun pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 0.04%. Laju inflasi Batam secara tahunan pada triwulan II-2007 tercatat sebesar 5,41% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan laju inflasi nasional triwulan II-2007 sebesar 5,77% (yoy).

Tingkat penurunan harga yang cukup tinggi pada bulan Mei 2007 didorong oleh penurunan harga bahan makanan sebesar 13,68%. Penurunan harga komoditas bahan makanan terutama didorong oleh penurunan harga cabai merah dan cabai rawit. Dari sisi penawaran turunnya harga bahan makanan tersebut dipengaruhi oleh pemenuhan dan distribusi yang telah terpenuhi dengan baik.

Kelompok Komoditi	2007				
	Tw.I	April	Mei	Juni	Tw.II
Umum	1.42	-0.03	-0.35	0.04	-0.35
1. Bahan Makanan	5.15	-0.48	-13.68	-0.56	-14.72
2. Makanan jadi, rokok & tembakau	1.32	-0.18	0.09	0.35	0.26
3. Perumahan, air, gas & bahan bakar	0.16	0.40	0.08	0.46	0.94
4. Sandang	1.04	0.60	-0.33	0.13	0.40
5. Kesehatan	0.24	0.31	0.36	0.23	0.91
6. Pendidikan, rekreasi & olahraga	0.00	0.11	0.00	0.17	0.06
7. Transport, Komunikasi & jasa keu	0.26	0.01	0.00	0.00	0.01

PERBANKAN

Sampai dengan Triwulan II-2007, kondisi sektor perbankan dan moneter di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan triwulan I-2007. Hal ini terlihat dari pertumbuhan tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 4,15% dari 53,87% pada triwulan I-2007 menjadi 56,50%.

Perkembangan kinerja Bank Umum di wilayah kerja KBI Batam tercermin dari besarnya penyaluran kredit yaitu sampai dengan triwulan II-2007 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2007 sebesar Rp.515 miliar atau sebesar 7,68% dibandingkan triwulan I-2007. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di wilayah kerja KBI Batam mengalami peningkatan sebesar Rp.332 miliar (2,67%).

Peningkatan penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit yang mengalami penurunan seiring dengan penurunan BI-rate secara berkala. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Agustus 2007 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada tingkat 8,25%. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap prospek pencapaian inflasi untuk tahun 2007 dan 2008 masing-masing $6\pm 1\%$ dan $5\pm 1\%$ dan perkembangan dan prospek perekonomian nasional.

Sementara itu, sampai dengan Triwulan II-2007 preferensi masyarakat dalam memilih jenis simpanan masih relatif tetap jika dibandingkan dengan Triwulan I-2007, dimana simpanan yang berbentuk giro mengalami peningkatan sebesar Rp.545 miliar (10,78%), sedangkan tabungan meningkat sebesar Rp.151 miliar (-10,23%). Namun simpanan

yang berbentuk deposito berjangka mengalami penurunan sebesar Rp.364 miliar (-10,23%).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit konsumsi masih memiliki porsi terbesar terhadap total kredit yaitu sebesar 39,40% diikuti dengan kredit modal kerja (34,39%) dan kredit investasi (26,20%). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penyaluran kredit oleh perbankan masih terdapat pada kredit konsumsi yang diikuti oleh kredit modal kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun kredit modal kerja masih memiliki porsi yang cukup seimbang dengan kredit konsumsi, namun peningkatan pertumbuhan kredit konsumsi (7,92%) lebih tinggi daripada peningkatan pertumbuhan kredit modal kerja (7,35%) dan kredit investasi (7,69%).

Fungsi intermediasi Bank Perkreditan Rakyat/BPR di wilayah KBI Batam mengalami pertumbuhan

Kondisi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sampai dengan Juni 2007 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Tingkat LDR BPR sampai dengan triwulan II-2007 sebesar 74,64% dan meningkat dibandingkan triwulan I-2007 yang tercatat sebesar 69,78%. Kredit yang disalurkan oleh BPR sampai dengan triwulan I-2007 mengalami peningkatan sebesar Rp.40,24 miliar (15,11%). Sedangkan DPK yang dihimpun oleh BPR mengalami peningkatan sebesar Rp.29,06 miliar (7,61%). Sampai dengan triwulan I-2007, total asset BPR di wilayah kerja KBI Batam mencapai Rp.498,56 miliar, total DPK mencapai Rp.410,71 miliar, dan penyaluran kredit mencapai Rp.306,565 miliar.

PROSPEK EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2007 diperkirakan positif

Perkembangan perekonomian regional yang positif pada triwulan I-2007, yang tercermin pada indikator perbankan, tingkat suku bunga, serta kondisi makro yang secara umum cukup stabil diperkirakan menjadi salah satu faktor pendukung ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang positif di triwulan II-2007.

Sumbangan sektor industri pada pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diperkirakan akan memberikan pangsa terbesar

Sektor industri yang memberikan pangsa terbesar dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2007, diperkirakan mampu meningkatkan sumbangannya terhadap pertumbuhan regional yang diikuti oleh faktor-faktor pendukung seperti: kebijakan Pemerintah Daerah yang kondusif, keamanan daerah, kesediaan infrastruktur, dll.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi regional tahun 2007 diperkirakan masih dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi. Hal ini terkait dengan faktor musiman serta meningkatnya belanja pemerintah daerah. Disamping itu, kegiatan perdagangan luar

negeri pada triwulan mendatang khususnya terkait dengan penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun diperkirakan juga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Laju inflasi Batam pada triwulan III-2007 diperkirakan relatif stabil.

Laju inflasi Batam pada triwulan III-2007 diperkirakan akan relatif stabil dibandingkan triwulan II-2007. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi penawaran diperkirakan cukup stabil, karena pemenuhan dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Perkembangan indikator perbankan pada triwulan III-2007 diperkirakan akan terus meningkat.

Sementara itu, perkembangan indikator perbankan triwulan III-2007 diperkirakan akan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan II -2007. Trend peningkatan penyaluran kredit diperkirakan akan terus meningkat pada triwulan III-2007 sejalan dengan dengan penurunan suku bunga kredit modal kerja dan investasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM

INDIKATOR	2006				2007		Pertumb
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	qtq
MAKRO							
Laju Inflasi (q-t-q)	0.66	-0.39	2.28	1.97	1.42	-0.34	-1.76
IHK Bahan Makanan	1.76	-2.16	4.70	5.91	3.79	-2.4	-6.19
IHK Makanan Jadi	0.93	0.25	2.88	0.98	1.32	0.27	-1.05
IHK Perumahan	0.14	0.24	0.13	0.25	0.22	0.93	0.71
IHK Sandang	0.22	0.35	-0.22	2.00	0.80	0.40	-0.4
IHK Kesehatan	0.56	0.44	0.08	1.08	0.27	0.91	0.64
IHK Pendidikan	-0.24	0.36	14.74	0.44	0.00	0.05	0.05
IHK Transport	0.10	0.11	0.27	0.01	0.47	0.02	-0.45
Pertumbuhan PDRB (q-t-q)	1.42	1.98	1.86	0.42	1.99	0.9	-1.09
Ekspor (Ribuan USD)	1,331,007	2,262,712	1,510,189	1,540,116	1,776,722	1,693.194	-99.90%
Impor (Ribuan USD) *)	2,755,827	2,182,516	1,755,450	2,390,744	1,992,707	2,109.679	-99.89%
PERBANKAN							
Deposito (miliar Rp)	2,302.86	2,725.13	2,934.75	3,506.05	3,560.43	3,196.35	-10.23%
Giro (miliar Rp)	3,429.73	4,435.88	4,988.06	5,086.04	5,057.69	5,602.99	10.78%
Tabungan (miliar Rp)	2,819.91	3,089.24	3,211.56	3,828.18	3,844.02	3,995.73	3.95%
DPK (miliar Rp)	8,552.50	10,250.25	11,134.37	12,420.27	12,462.14	12,795.07	2.67%
Total Asset (miliar Rp)	10,559.53	12,513.64	13,115.16	14,592.74	14,617.08	15,106.94	3.35%
Kredit Umum (miliar Rp)	5,771.56	6,283.82	6,258.18	6,666.36	6,713.06	7,228.68	7.68%
KUK (miliar Rp)	733.61	745.69	660.37	721.82	736.52	868.99	17.99%
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	15.58%	16.67%	17.34%	15.47%	24.85%		-100.00%
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertimbang)	10.20%	10.09%	9.82%	8.25%	8.15%		-100.00%
LDR (%)	67.48%	59.69%	56.21%	53.67%	53.87%	56.50%	2.63%
NIM (%)	1.21%	2.31%	3.32%	4.09%	0.95%	2.00%	1.05%
NPL (%)	6.17%	5.87%	6.41%	4.34%	4.46%	4.28%	-0.18%
SISTEM PEMBAYARAN							
Inflow (miliar Rp)	804.04	416.46	235.33	232.92	120.71	60.55	-49.84%
Outflow (miliar Rp)	933.75	854.39	686.06	1,134.52	365.75	502.94	37.51%
PTTB (miliar Rp)	204.92	131.42	91.3	108.2	60.05	41.23	-31.34%
Nominal Uang Palsu	2,060,000	1,220,000	490,000	390,000	140,000	670,000	378.57%
Jumlah uang palsu (lembar)	25	28	11	8	4	18	350.00%
Volume Kliring (lembar)	146,241	154,662	134,863	103,808	104,613	108,413	3.63%
Nominal Kliring (miliar Rp)	2,168.74	2,734.43	2,584.61	2,437.40	2,297.29	2,267.88	-1.28%
KEUANGAN DAERAH KOTA BATAM							
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	18.81	42.67	67.90	94.68	17.01	0	-100.00%
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	2,028.55	58,994.97	124,236.99	150.97	36.55	0	-100.00%
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	37,300.75	37,300.75	722,713.15	10.33	-	0	

Data Ekspor & Impor, sumber PDIE Jakarta

Ket: *) Data impor sejak tahun 2005 termasuk Kawasan Berikat

Bab 1

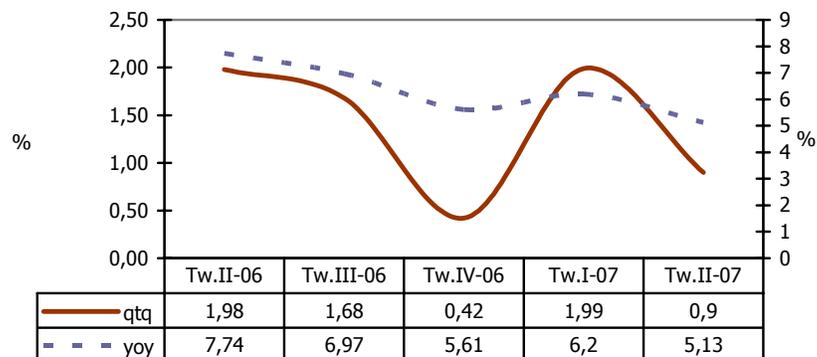
Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau masih menunjukkan kinerja yang positif. Memasuki triwulan II-2007, perkembangan ekonomi makro Provinsi Kepulauan Riau mengalami perbaikan dan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,13% (yoy), masih lebih rendah dari triwulan I-2007 yang tercatat sebesar 6,20%. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tahunan di daerah Kepulauan Riau didorong oleh sektor industri (59,74%), sektor pertambangan (10,33%), sektor perdagangan (8,08%), sektor pertanian (4,99%). Sektor industri memberikan sumbangan terbesar pada perekonomian regional Kepri dengan tingkat pertumbuhan mencapai 3,91% (yoy).

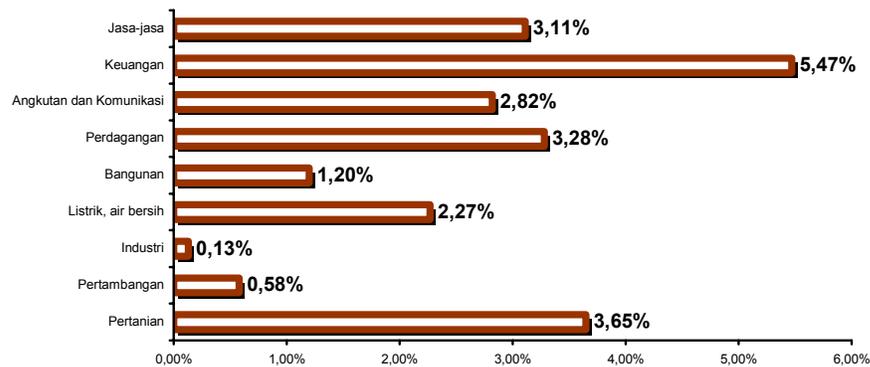
Sementara itu, secara triwulanan pertumbuhan ekonomi regional sebesar 0,90% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan I-2007 yang tercatat 1,99%. Sektor pertanian yang mengalami kontraksi pada akhir tahun 2006 mulai mengalami perbaikan pada sampai dengan triwulan II-2007, sektor ini tumbuh sebesar 3,65% (qtq) meskipun sub-sektor tanaman pangan dan sub-sektor perkebunan tumbuh negatif, masing-masing sebesar -0,98% dan -5,71%. Namun sub-sektor perikanan dan sub-sektor peternakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik masing-masing sebesar 5,03% dan 2,68%.

GRAFIK 1.1 – PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



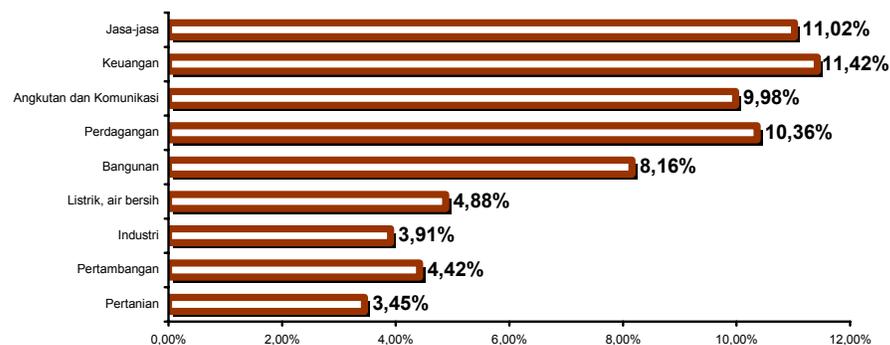
Selain pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, indikator perekonomian lainnya juga menunjukkan kondisi yang membaik, diantaranya adalah: pergerakan IHK yang stabil, perkembangan penduduk, angkatan kerja dan pengangguran, tingkat kemiskinan, serta jumlah PMA dan PMDN. Sementara itu, perekonomian nasional terus berlanjut yang ditunjukkan dengan stabilitas makro ekonomi yang semakin membaik. Kinerja ekspor dan permintaan domestik menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pertumbuhan investasi. Di samping itu, penguatan nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan volatilitas serta inflasi IHK yang tetap terkendali dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Neraca Pembayaran Indonesia, terjaganya faktor risiko dan menariknya imbal hasil rupiah. Berdasarkan hal tersebut, melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 5 Juli 2007 kembali menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari 8,50% menjadi 8,25%.

GRAFIK 1.2 – LAJU PERTUMBUHAN TRIWULANAN PDRB TRIWULAN I-2007



Dari sisi penawaran, pertumbuhan triwulanan terbesar terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 5,63% (qtq), terutama disumbangkan oleh sub sektor komunikasi. Peningkatan terbesar berikutnya dialami oleh sektor jasa-jasa sebesar 5,37% (qtq). Sementara itu, sektor industri yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,52%.

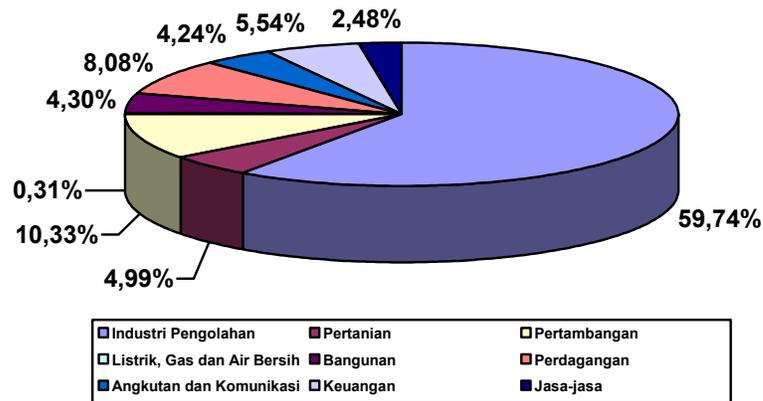
GRAFIK 1.3 – LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB TRIWULAN II-2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

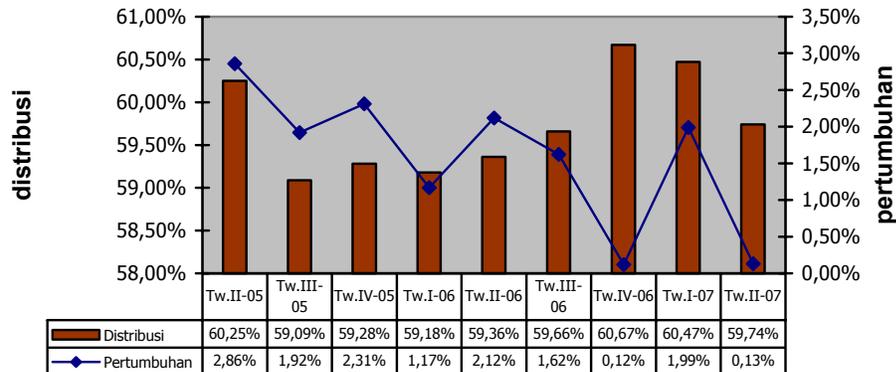
Berdasarkan grafik 1.3 diatas, secara tahunan sektor jasa memiliki tingkat pertumbuhan terbesar diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi. Meskipun demikian, sektor industri masih menjadi sektor dominan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menunjukkan bahwa industri masih menjadi sektor unggulan meskipun porsinya mengalami penurunan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Sektor industri merupakan sektor utama di Provinsi Kepri sebagaimana rencana awal pengembangan pulau Batam di awal tahun 1980-an.

GRAFIK 1.3 – SHARE PER SEKTOR TERHADAP PDRB TRIWULAN II-2007



Awalnya pengembangan investasi hanya difokuskan di pulau Batam dengan luas 415 km², dimana seiring dengan perkembangan investasi maka kebutuhan terhadap lahan juga semakin meningkat. Untuk itu maka pada tahun 1992 wilayah industri di Batam diperluas hingga ke pulau Rempang dan Galang, sehingga luas keseluruhan menjadi 715 km². Selain ditetapkan sebagai daerah industri, Batam juga dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya seperti: perdagangan, pariwisata, dan bongkar muat (*transshipment area*).

GRAFIK 1.4 – PERKEMBANGAN TINGKAT PERTUMBUHAN & DISTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA TW.I-2007



Sektor industri memberikan distribusi sebesar 59,74% terhadap PDRB Provinsi Kepri pada triwulan II-2007. Letak Batam yang strategis menjadikan wilayah ini unggul secara komparatif dibandingkan wilayah lainnya di Pulau Sumatera karena berada dekat dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga sektor industri dan perdagangan menjadi sektor utama daerah ini. Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa tingkat distribusi sektor industri terhadap PDRB cukup stabil dengan laju pertumbuhan yang meningkat.

Wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan perairan, menjadikan sektor perikanan sebagai penyumbang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu jenis komoditi yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan kerapu, yang saat ini dicanangkan Pemerintah Daerah sebagai komoditas perikanan unggulan di samping udang, ikan nila dan rumput laut. Pengembangan perikanan kerapu diarahkan pada pembudidayaannya terutama untuk memenuhi pasar ekspor di samping pasar domestik.

Sejak dikuasainya teknologi produksi benih (*hatchery*) kerapu, perkembangan budidaya kerapu di perairan laut berkembang di berbagai daerah. Benih hasil *hatchery* yang diproduksi di berbagai lokasi telah banyak digunakan menggantikan benih alam yang sudah semakin sulit diperoleh. Terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi memiliki program-program yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana di bidang dimaksud, antara lain adalah dengan memperkuat permodalan nelayan sebanyak 1.100 nelayan dan 100 koperasi nelayan. Di samping itu, revitalisasi pelabuhan perikanan direncanakan sebanyak 2 unit, dan revitalisasi tempat pelelangan ikan sebanyak 3 unit, serta pembangunan pabrik es sebanyak 2 unit.

Adapun sektor bangunan turut memberikan distribusi terhadap tingkat PDRB Provinsi Kepri meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor properti menjadi satu hal yang menarik untuk diperhatikan dan dikembangkan mengingat pertumbuhan sektor ini cukup besar. Maraknya pembangunan sektor properti dapat dilihat dari alokasi lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), dari luas Pulau Batam seluas 41.500 hektar, sampai akhir tahun 2005 pihak Otorita Batam telah mengalokasikan lahan untuk sektor perumahan sebesar 9.646 hektar atau 39,85%.

Berdasarkan hasil survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Kota Batam yang merupakan kerjasama antara BI Batam dengan Politeknik Batam, diketahui bahwa pada tw.II-2007 tingkat IHPR sebesar 105,82 atau mengalami penurunan sebesar 3,13%. IHPR untuk tipe besar menurun sebesar 0,39% dan tipe menengah menurun sebesar 4,06%. Sedangkan tipe kecil masih melanjutkan tren kenaikan sebesar 0,93%. Diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya tipe menengah juga mengalami penurunan indeks harga. Penurunan indeks ini mengindikasikan

rumah untuk tipe menengah mulai mendekati kondisi over supply dan mulai mengarahkan produknya ke tipe yang lebih kecil.

1.2 PERKEMBANGAN PENDUDUK¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan 2007 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.394.177 jiwa, dimana sebagian besar penduduk terdapat di Kota Batam (51,21%), Kabupaten Karimun (14,95%), dan Kota Tanjung Pinang (12,38%).

TABEL 1.1 – JUMLAH PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Batam	713.960	51,21
2. Karimun	208.400	14,95
3. Tanjung Pinang	172.616	12,38
4. Bintan	121.303	8,70
5. Natuna	93.644	6,72
6. Lingga	84.254	6,04
Total	1.394.177	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kota Batam yang menempati urutan teratas berdasarkan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian yang berkembang di daerah tersebut, dimana sektor industri dan perdagangan memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Kedua sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi yang dominan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan proporsi penduduk Batam menjadi lebih heterogen dari Kabupaten/Kota lainnya baik dari sisi agama maupun dari sisi suku bangsa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, dapat dilihat bahwa persentase terbesar suku bangsa yang menghuni Kota Batam adalah suku Jawa (26,69%) diikuti oleh suku Melayu (20,90%) dan suku Batak (14,92%). Sebaran dan kepadatan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan skala pembangunan saja, akan tetapi skala kegiatan pemerintahan juga berpengaruh. Perkiraan ini terkait dengan ketersediaan fasilitas bagi penduduk seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan dan sebagainya. Dari hasil sensus tersebut juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Batam sebagian besar berada pada usia produktif (antara 15-64 tahun) yaitu sebesar 76,76% sedangkan untuk usia 15 tahun ke bawah sebesar 22,58% dan untuk usia 65 tahun keatas sebesar 0,66%.

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Tanjung Pinang berada di urutan ketiga setelah Tanjung Balai Karimun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sektor ekonomi yang berkembang di daerah tersebut, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Karimun bekerja di sektor pertanian yang dikelompokkan dalam 5 sub sektor yaitu: tanaman pangan, peternakan,

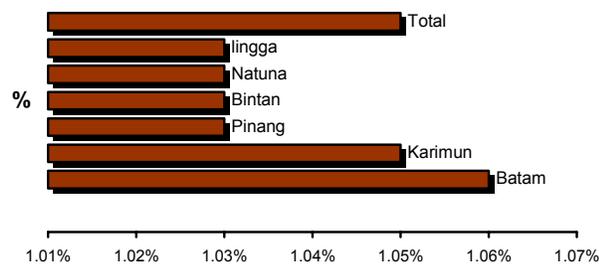
¹ berdasarkan definisi BPS yang dimaksud penduduk adalah *all residents in the entire geographical territory of the RI who have stayed for 6 months or longer and those who intend to stay even though their length of stay were less than 6 months*

perikanan, kehutanan dan perkebunan. Namun demikian sub sektor perikanan merupakan sektor yang paling signifikan dibanding sub sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan di daerah Karimun menghasilkan 3 (tiga) bahan tambang/galian utama, yaitu pertambangan timah, granit dan penggalan pasir.

Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004, Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi dimana pusat pemerintahan untuk 2 (dua) tahun pertama bertempat di Kota Batam. Sejak Februari tahun 2006 pusat pemerintahan berada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi jumlah penduduk di kota Tanjung Pinang, mengingat pusat pemerintahan berada di daerah tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat setiap tahunnya, dimana tingkat pertumbuhan pada tahun 2006 terhadap tahun 2005 mencapai 1,05% dengan pertumbuhan terbesar terdapat di Kota Batam.

GRAFIK 1.5 – LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005-2007



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau yang terus meningkat juga diiringi dengan jumlah angkatan kerja serta tingkat tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan bahwa sampai dengan Agustus 2006 terdapat 587.474 orang angkatan kerja dimana sebanyak 515.560 orang yang bekerja dan sisanya (71.914 orang) merupakan pengangguran.

Adapun definisi angkatan kerja berdasarkan BPS adalah penduduk yang berusia diatas 15 tahun. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 2,18% dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat 0,41% dan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja meningkat 16,98%.

TABEL 1.2 – PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Keterangan	Feb 2006	Agust 2006	%
Angkatan Kerja	574.935	587.474	2,18
- Bekerja	513.457	515.560	0,41
- Pengangguran	61.478	71.914	16,98
Bukan Angkatan Kerja	333.467	327.549	-1,77

- Sekolah	76.213	61.375	-19,47
- Mengurus Rmh Tangga	216.216	220.851	2,14
- Lainnya	41.038	45.323	10,44
Total Penduduk 15+	908.402	915.023	0,73
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,69%	12,24%	1,55
TPAK	63,29%	64,20%	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan berdasarkan data pada bulan Agustus 2006 adalah sektor industri sebanyak 127.511 orang atau sebesar 24,73%.

TABEL 1.3 – JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lapangan Pekerjaan	Feb 2006	% distribusi	Agust 2006	% distribusi	% perkembangan
Pertanian	101.484	19,76	100.866	19,56	-0,61
Industri	148.635	28,95	127.511	24,73	-14,21
Bangunan	36.507	7,11	31.990	6,20	-12,37
Perdagangan	88.446	17,23	117.821	22,85	33,21
Angkutan	47.734	9,30	45.241	8,77	-5,22
Kuangan	5.898	1,15	12.661	2,46	114,67
Jasa	77.748	15,14	73.965	14,35	-4,87
Lainnya	7.005	1,36	5.530	1,07	-21,06
TOTAL	513.457	100	515.585	100	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 1.3 terlihat bahwa terdapat peningkatan penduduk usia angkatan kerja, sebaliknya penduduk yang bukan angkatan kerja terjadi penurunan. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang meningkat 1,55% yaitu dari 10,69% (Feb 2006) menjadi 12,24% (Agust 2006).

Sementara itu, di samping sektor industri, jumlah angkatan kerja terbesar juga terdapat di sektor perdagangan sebanyak 117.821 orang (22,85%), dan sektor pertanian sebanyak 100.866 orang (19,56%). Meskipun demikian, perkembangan jumlah angkatan kerja berdasarkan sektor usaha sebagian besar mengalami penurunan dibandingkan Februari 2006. Adapun pertumbuhan angkatan kerja terbesar terdapat pada sektor perdagangan yaitu sebesar 33,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor usaha yang memberikan tingkat distribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah serta mampu menyerap tenaga kerja di sektor tersebut. Kota Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta terdiri dari kepulauan turut mempengaruhi sektor usaha yang berkembang di wilayah ini. Di samping itu, rencana pengembangan wilayah serta kebijakan pemerintah yang mengarah pada perkembangan industri menyebabkan sisi perdagangan dan jasa menjadi sektor yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian daerah.

1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang menunjukkan persentase pencapaian kualitas dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada 3 (tiga) faktor yang paling esensial dalam

kehidupan manusia, yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kelangsungan hidup dan sehat adalah angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 mencapai 72,2 dan menempati urutan ke-7 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Batam menempati urutan IPM ke-8 dari 440 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan nilai 76,5 dan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2005.

TABEL 1.4 – IPM KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2004

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
Provinsi Kepri	68,8	94,7	8,0	613,0	70,8	8
Karimun	69,2	95,0	7,8	614,1	71,0	102
Bintan	69,0	92,3	7,1	613,9	69,7	152
Natuna	67,0	95,3	6,7	596,3	67,7	235
Lingga	68,9	90,3	7,0	605,0	67,7	236
Kota Batam	70,1	98,4	10,4	634,2	75,8	11
Kota Tj. Pinang	68,8	96,7	9,1	614,7	72,2	77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

TABEL 1.5 - IPM KAB/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 UNTUK DAU 2006

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
Provinsi Kepri	69,5	96,0	8,1	621,9	72,2	7
Karimun	69,5	95,0	7,8	620,8	71,7	101
Bintan	69,3	92,9	7,3	623,0	70,9	137
Natuna	67,5	95,3	6,7	602,0	68,4	239
Lingga	69,2	90,9	7,1	611,6	69,4	193
Kota Batam	70,5	98,8	10,7	638,3	76,5	8
Kota Tj. Pinang	69,1	97,3	9,2	616,5	72,7	79

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

Nilai IPM tahun 2006 lebih baik dibandingkan tahun 2005 menyebabkan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai IPM dengan peringkat yang baik disebabkan oleh angka harapan hidup yang masing-masing sebesar 70,5 tahun dan 69,5 tahun. Di samping itu peran angka harapan hidup tersebut juga ditunjang oleh komponen angka melek huruf dimana nilai untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 96,0% dan Kota Batam sebesar 98,8%. Secara parsial per Kab/Kota angka harapan hidup tertinggi terdapat di Kota Batam (70,5 tahun) sedangkan harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Natuna (67,5 tahun). Untuk Kab/Kota lainnya seperti Karimun, Bintan, Lingga dan Tanjung Pinang masing-masing sebesar 69,5 tahun, 69,3 tahun, 69,2 tahun, dan 69,1 tahun. Untuk indikator angka melek huruf, angka tertinggi terdapat di Kota Batam (98,8%) sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Lingga (90,9%).

Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2006 naik 2 (dua) peringkat menjadi 108 dibandingkan tahun 2005. Sementara laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3% per tahunnya. IPM Indonesia pada tahun 2006 naik 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari urutan 110 atau angka indeks 0,697 (skala 1-0) menjadi peringkat ke 108 (0,711) dari 177 negara. Berdasarkan laporan tersebut, sepanjang periode 1990-2004, jumlah penduduk miskin di Indonesia yang hidup dengan pendapatan US\$1 per harinya mencapai 7,5%. Sementara yang berpendapatan US\$2 per harinya mencapai 52,4%, dan berdasarkan kriteria garis kemiskinan nasional (2.100 kalori per hari per orang) sebesar 27,1%.

TABEL 1.6 – PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2006

Negara	2003		2004		2005		2006	
	Peringkat **	IPM *	Peringkat ***	IPM *	Peringkat ***	IPM *	Peringkat	IPM
Singapura	28	0,884	25	0,902	25	0,907	25	0,916
Brunei	31	0,872	33	0,867	33	0,866	34	0,871
Thailand	74	0,768	76	0,768	73	0,778	74	0,784
Filipina	85	0,751	83	0,753	84	0,758	84	0,763
Vietnam	109	0,688	112	0,691	108	0,704	109	0,709
Indonesia	112	0,682	111	0,692	110	0,697	108	0,711
Myanmar	131	0,549	132	0,551	129	0,578	130	0,581
Kamboja	130	0,556	130	0,568	130	0,571	129	0,583

*Ket: *Skala 0-1, **dari 175 negara yang diperingkat, ***dari 177 negara yang diperingkat*

Sumber: HDR 2006

1.4 TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pengentasan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tujuan dasar dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2006 sebanyak 73.679 orang yang merupakan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

**TABEL 1.7 – PREDIKSI ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU – MEI 2006**

No.	Kab/Kota	Rumah Tangga Penerima BLT					Koreksi RT-BLT Miskin	Prediksi Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan 2004
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	RT-BLT Miskin	Jml			
1.	Kab. Karimun	312	5.194	2.211	7.405	7.717	3.969	13.232	11.526
2.	Kab. Bintan	6.335	2.569	1.307	3.876	10.211	4.697	14.706	13.304
3.	Kab. Natuna	1.334	5.492	1.994	7.486	8.820	2.375	6.565	4.510
4.	Kab. Lingga	3.670	1.640	1.837	3.477	7.147	4.288	12.659	11.252
5.	Kota Batam	19.051	8.025	6.332	14.357	33.408	10.587	32.160	28.064
6.	Kota Tj. Pinang	1.242	4.582	552	5.134	6.376	5.203	18.746	17.039
	TOTAL	31.944	27.502	14.233	41.735	73.679	31.119	98.068	85.695

Sumber : Badan Pusat Statistik

1.5 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, sampai dengan bulan September 2006 jumlah tenaga kerja sektor formal sebanyak 236.793 orang dan meningkat sebesar 0,03% (72 orang) dibandingkan Desember 2005.

Dari 236.793 orang pekerja tersebut sebagian besar (76,53%) atau sebanyak 181.210 orang bekerja pada sektor industri, sedangkan sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran dengan jumlah pekerja masing-masing sebanyak 19.820 orang (8,37%) dan 17.659 orang (7,46%). Sementara itu, menurut jenis kelamin, sebesar 56,90% pekerja di Kota Batam adalah perempuan sedangkan pekerja laki-laki sebesar 43,10%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, terjadi kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1,55% selama periode Februari – Agustus 2006. Angka pengangguran pada bulan Februari 2006 sebesar 61.478 orang, dan pada bulan Agustus 2006 meningkat menjadi 71.914 orang atau naik 10.436 orang (1,55%). Angka tersebut diperoleh dari hasil survei angkatan kerja nasional di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006.

Meskipun terjadi peningkatan angka pengangguran, namun angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan 0,41%, dimana angka angkatan kerja yang bekerja pada bulan Februari 2006 mencapai 513.457 orang, dan Agustus 2006 sebanyak 515.569 orang, naik 2.112 orang (0,41%). Dari jumlah tersebut, tenaga kerja terbesar di dominasi pada sektor industri yaitu sebanyak 148.635 orang (bulan Februari 2006) dan menurun menjadi 127.511 orang (bulan Agustus 2006). Selanjutnya sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar yang mencapai 101.484 orang (bulan Februari 2006) dan 100.866 orang (bulan Agustus 2006).

1.6 PERKEMBANGAN PARIWISATA

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam pada tahun 2006 berjumlah 1.011.852 orang, menurun 3,03% dibandingkan tahun 2005.

TABEL 1.8 – PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA KE KOTA BATAM TAHUN 2004 - 2006

Periode	2004	2005	2006
1. Januari	126.168	124.169	82.584
2. Februari	123.263	83.677	69.254
3. Maret	134.119	83.811	83.725
4. April	90.409	79.967	86.676
5. Mei	122.141	90.924	86.834
6. Juni	142.557	90.828	93.857
7. Juli	134.233	87.022	86.219
8. Agustus	142.490	77.993	83.772
9. September	129.622	76.547	79.716
10. Oktober	126.868	69.793	70.914
11. November	106.377	68.539	84.949
12. Desember	148.844	90.148	103.352
Jumlah	1.527.131	1.043.418	1.011.852

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tercatat pada Kantor Imigrasi Batam terlihat terus mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2004, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Batam setiap bulannya adalah 127.260 orang, tahun 2005 rata-rata sebanyak 86.952 orang/bulan, dan tahun 2006 rata-rata sebanyak 84.321 orang/bulan. Penurunan kunjungan wisman diperkirakan sebagai pengaruh dari kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan sektor pariwisata di daerah, di samping itu secara tidak langsung disebabkan penerapan PP No.63 tahun 2003 tentang peningkatan harga kebutuhan hidup termasuk elektronika, termasuk pelarangan impor beras dan penetapan distributor tunggal untuk gula pasir telah berdampak pada peningkatan biaya tarif dan jasa bagi para wisman.

Untuk itu diperlukan upaya oleh pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan potensi yang ada, serta menciptakan *event-event* yang dapat menjadi daya tarik bagi wisman untuk berkunjung ke Batam. Penurunan kunjungan wisman ini diperkirakan bersifat kondisional mengingat peningkatan kunjungan wisatawan berkaitan dengan masa liburan yang terjadi pada bulan Juni dan Desember. Namun pada tahun 2006, meskipun terjadi peningkatan kunjungan, namun jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2004 dan 2005. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya oleh pihak-pihak terkait untuk menciptakan *event-event* yang diperkirakan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Batam.

Di samping itu, Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Provinsi Kepri, salah satunya adalah pembangunan jalan lintas barat sepanjang 47 km yang menghubungkan Desa Busung Kecamatan Bintan Utara dengan Kecamatan Gunung Kijang. Rencananya di jalur lintas selebar 50m tersebut akan dibangun 5 jembatan.

Sementara itu, selama tw.IV-2006 jumlah wisman mancanegara yang berkunjung ke Batam masih didominasi oleh warga negara Singapura dengan kontribusi sebesar 65,02%.

TABEL 1.9 – PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA MENURUT KEBANGSAAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA BATAM

Kebangsaan	2005			2006			
	Tw.I	Tw.II	Sem.I	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
1. Singapura	218.876	185.053	403.929	150.052	182.453	163.157	168.552
2. Malaysia	33.721	31.402	65.123	30.419	32.168	33.321	35.024
3. Korsel	11.429	17.060	28.489	22.476	18.440	17.515	19.612
4. Jepang	5.688	6.564	12.252	6.500	6.177	6.235	5.728
5. Inggris	2.630	2.358	4.988	2.490	2.449	2.425	2.478
6. Amerika	1.891	2.031	3.922	1.937	1.800	1.976	1.972
7. Taiwan	1.400	1.792	3.192	1.263	1.561	3.370	1.484
8. Australia	1.752	1.701	3.453	1.604	1.688	1.543	1.599
9. Jerman	1.027	570	1.597	634	627	616	621
10. Belanda	374	381	755	423	406	591	614
11. Lainnya	12.869	12.807	25.676	17.765	19.598	18.958	21.531
Jumlah	291.657	261.719	553.376	235.563	267.367	249.707	259.215

Sumber : Badan Pusat Statistik

Satu hal yang menarik adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Visa Internasional untuk wilayah Indonesia, dimana Batam menduduki peringkat ke-3 dari total belanja yang dikeluarkan wisman yang datang ke Indonesia, dan mencapai USD.12 juta (2,2%). Sedangkan

untuk peringkat pertama belanja terbesar wisman adalah Bali dengan total belanja mencapai USD 261 juta (47%), disusul Jakarta dengan pengeluaran USD.186 juta (33%). Meskipun jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tahun 2005 turun 6% dibanding 2004 yang tercatat sebesar 5,3 juta orang, namun jumlah transaksi pembelanjaan yang dilakukan wisman justru mengalami peningkatan sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut berdasarkan pembelanjaan wisman yang datang ke Indonesia, yang nantinya akan bermanfaat bagi pelaku pariwisata di Indonesia sehingga diketahui *trend* pembelanjaan wisman dengan adanya isu-isu nasional. Transaksi terbanyak dilakukan di hotel yang tercatat 852.000 transaksi dengan nilai mencapai USD.198 juta (26%), kemudian pembelanjaan di restoran sebesar USD.36 juta (6%), pembelanjaan Departemen Store yang mencapai USD.90 juta (16%).

Sementara itu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun mengajak para pengusaha hotel untuk meningkatkan sektor pariwisata, antara lain dengan menyusun kalender kegiatan atau program setiap bulannya sehingga mendukung program wisata di Karimun.

1.7 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Batam dari sisi jumlah perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 59 perusahaan pada periode Januari-Desember 2005 menjadi 95 perusahaan pada periode yang sama tahun 2006. Sementara itu, nilai investasi yang direncanakan (termasuk perluasan usaha) mengalami peningkatan, dari US\$ 242,39 juta menjadi US\$ 376,79 juta atau naik sebesar 55,45%.

Negara asal investasi pada periode Januari-Desember 2006 adalah Singapura, Korea Selatan, RRC, Jepang, Malaysia, Australia, Belanda dan Inggris dengan bidang usahanya berupa industri perkapalan, industri rokok, industri kemasan, perdagangan ekspor impor, industri pakaian jadi, jasa akomodasi dan jasa lainnya.

TABEL 1.10 – PERKEMBANGAN RENCANA INVESTASI ASING DI KOTA BATAM

Periode	2005		2006	
	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)
Semester I	29	82.996.927	44	168.138.111
Semester II	30	159.396.684	51	208.658.662
Total	59	242.393.611	95	376.796.773

Sumber : Subdit BKPM Otorita Batam

Keterangan : *) termasuk perluasan usaha

Berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM – Darmawan Djajusman disebutkan bahwa target realisasi investasi pada tahun 2006 untuk PMDN sebesar Rp.35,32 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp.13,54 triliun atau 38,34%. Sedangkan target investasi PMA Rp.97,50 triliun dan terealisasi Rp.43,46 triliun atau 44,57%. Sementara

itu, untuk tahun 2007 diperkirakan jumlah investasi tumbuh sebesar 12,5% dengan alasan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia diantaranya berupa pemberian insentif fiskal.

Saat ini Thailand memberikan *tax holiday* 3-8 tahun dengan pembebasan bea masuk impor barang modal dan bahan baku. Vietnam memberikan *tax holiday* 2-4 tahun dengan pemotongan pajak 10%-20%. Singapura memberikan *tax holiday* 5-10 tahun dengan pemotongan pajak 10%-20%. Sedangkan China memberikan pemotongan pajak 33% dengan pembebasan bea masuk maksimal 5%. Sementara itu, Indonesia memberikan keringanan bea masuk maksimal 5% dengan *investment allowance* sebesar 30% selama 6 tahun yang diatur dalam PP 148/2000 yang hingga saat ini belum dapat dioperasikan.

1.8 PERKEMBANGAN PEDAGANG VALUTA ASING (PVA)

Pedagang Valuta Asing (PVA) atau dikenal dengan *money changer* memiliki peranan yang cukup besar dalam sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan ini, antara lain dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur keberadaan PVA antara lain : Peraturan Bank Indonesia / PBI No.6/1/PBI/2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang PVA, serta Surat Edaran / SE No.6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 tentang tata cara perizinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan penerapan sanksi bagi PVA bukan bank.²

Pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mendukung peranan PVA di Indonesia, antara lain :

- i. Untuk memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, PVA merupakan lembaga penunjang sektor keuangan yang memiliki peranan yang cukup strategis khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik.
- ii. Untuk mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan PVA perlu ditingkatkan.

Sampai dengan tw.II-2007, jumlah PVA yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam berjumlah 104 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 5 PVA dibandingkan tw.I-2007 yang tercatat sebanyak 99 PVA yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KBI Batam. Rincian jumlah PVA pada masing-masing Dati-II di Provinsi Kepulauan Riau adalah: 72 PVA di Kota Batam, 15 PVA di Kota Tanjung Pinang, 10 PVA di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, 3 PVA di Tanjung Uban, dan 4 PVA di Bintan.

² Peraturan Bank Indonesia dapat dilihat melalui <http://www.bi.go.id>

TABEL 1.11 – PERKEMBANGAN JUMLAH PVA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2006

No	Kab/Kota	2006			2007	
		Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
1.	Batam	59	66	67	69	72
2.	Tanjung Pinang	13	13	13	13	15
3.	Tanjung Balai Karimun	9	9	9	10	10
4.	Tanjung Batu	3	3	3	3	3
5.	Bintan	3	3	4	4	4
TOTAL		87	94	96	99	104

Sumber: Bank Indonesia

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah PVA yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Batam terus meningkat setiap triwulan. Adapun peningkatan yang besar terjadi pada Tw.III-2006 yaitu sebanyak 7 PVA baru yang beroperasi di Batam. Hal tersebut disebabkan oleh pembukaan PVA baru akibat dari pendirian *mall* baru di Batam.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PVA yang melakukan usaha di wilker KBI Batam menempati urutan ke-3 (tiga) di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank tersebut diperkirakan karena tingginya permintaan akan transaksi Uang Kertas Asing (UKA) terkait dengan letak geografis yang berada di pulau terluar Republik Indonesia.

Sementara itu, rekapitulasi volume usaha PVA selama tw.II-2007, secara rata-rata terdapat penurunan transaksi pembelian maupun penjualan mata uang valuta asing.

TABEL 1.12 – REKAPITULASI VOLUME USAHA PEDAGANG VALUTA ASING DI WILKER KBI BATAM

Pembelian/ Penjualan	Tw.IV-06		Tw.I-07		Tw.II-07	
	Pembelian	Penjualan	Pembelian	Penjualan	Pembelian	Penjualan
USD	2.117.920,00	1.650.981,60	3.646.472,10	3.571.450,03	2.148.012,70	1.999.776,42
SGD	63.152.384,99	57.618.069,81	85.991.644,85	85.624.432,10	50.383.556,13	50.970.046,48
MYR	13.305.204,89	13.890.160,23	29.573.302,09	30.933.173,10	9.854.564,25	12.805.749,09

Sumber: Bank Indonesia

1.9 PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. PDRB per-kapita dan pendapatan per-kapita mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh proses produksi suatu daerah setelah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besar dan kecilnya jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per-kapita maupun pendapatan per-kapita.

TABEL 1.13 – PENDAPATAN PER-KAPITA PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE TRIWULAN I-2007

Rincian	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1. PDRB Provinsi tw.II-2007	Rp. 12.616.111.120.000	Rp. 8.482.680.200.000
2. Jumlah Penduduk tw.II-2007	1.394.177 jiwa	
3. Pendapatan Per-Kapita	Rp. 9.049.146,93	Rp. 6.084.363,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, data Diolah

Berdasarkan tabel 1.8, terlihat bahwa pendapatan per-kapita penduduk tw.II-2007 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 9.049.146,93 sedangkan jika dilihat secara riil (atas dasar harga konstan 2000) pendapatan per-kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.6.084.3963,89.

Tingkat Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp.815.000,00 dan UMK untuk tahun 2007 sebesar Rp.815.000,00. Adapun Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp.805.600,00.

SEKTOR EKONOMI DOMINAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2007 secara triwulanan (qtq) sebesar 1,76% menurun dibandingkan pertumbuhan pada tw.I-2007 yang tercatat sebesar 1,99%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar berdasarkan lapangan usaha adalah komponen angkutan dan komunikasi (5,63%) diikuti komponen jasa (5,37%) dan komponen perdagangan (4,78%).

Keberadaan ekonomi suatu Kabupaten/Kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu provinsi. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Batam merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan yang terlihat dari nilai kontribusinya yang mencapai 77% baik berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Sementara itu penyumbang nomor kedua adalah Kota Tanjung Pinang dengan nilai kontribusinya diatas 6%.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2002 terjadi pergeseran pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang semula pada Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Karimun, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan dari 5,90% (tahun 2000) menjadi 5,18% (tahun 2004). sedangkan kontribusi Kabupaten Karimun naik dari 5,57% (tahun 2000) menjadi 6,12% (tahun 2004).

TABEL 1.14 – KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBENTUKAN PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2000 – 2004 (%)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
A. Atas dasar harga berlaku					
1. Karimun	5,57	5,66	5,91	5,78	6,12
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,87	5,65	5,35	5,18
3. Natuna	2,12	2,25	2,40	2,63	2,86
4. Lingga	1,59	1,62	1,59	1,58	1,56
5. Batam	78,50	78,25	77,99	78,48	77,65
6. Tanjung Pinang	6,32	6,36	6,48	6,17	6,64
Provinsi Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Atas dasar harga konstan 2000					
1. Karimun	5,57	5,63	5,54	5,49	5,37
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,84	5,69	5,54	5,36
3. Natuna	2,12	2,14	2,11	2,10	2,06
4. Lingga	1,59	1,60	1,59	1,58	1,54
5. Batam	78,50	78,44	78,67	78,90	79,35
6. Tanjung Pinang	6,32	6,34	6,41	6,39	6,31
Provinsi Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari nilai kontribusi Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi menurut lapangan pekerjaan, terlihat bahwa pada tahun 2004 Kota Batam merupakan penyumbang terbesar di hampir semua sektor lapangan usaha kecuali sektor pertanian dan pertambangan. Sumbangan Kota Batam pada sektor-sektor tersebut berkisar antara 43,81% sampai 91,71%. Pada sektor pertanian dan pertambangan peranan Kota Batam masih cukup signifikan karena nilai sumbangannya masih mencapai diatas 18%. Untuk sektor pertanian Kabupaten Natuna dan Karimun adalah penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB Provinsi di sektor ini dimana sekitar 60% nya merupakan sumbangan dari kedua Kabupaten tersebut. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Kepri / Bintan dan Karimun menyumbang hampir 80% dari PDRB Provinsi.

1.9.1 PDRB Sisi Penawaran / Produksi

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama tw.II-2007 masih didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi sebesar 59,74% diikuti oleh sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 10,33%, sedangkan sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, dan sektor pertanian. Sektor industri berkembang di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, sedangkan sektor pertambangan & penggalian bertumpu pada pertambangan migas di Kabupaten Natuna. Sementara itu sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, serta sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Lingga.

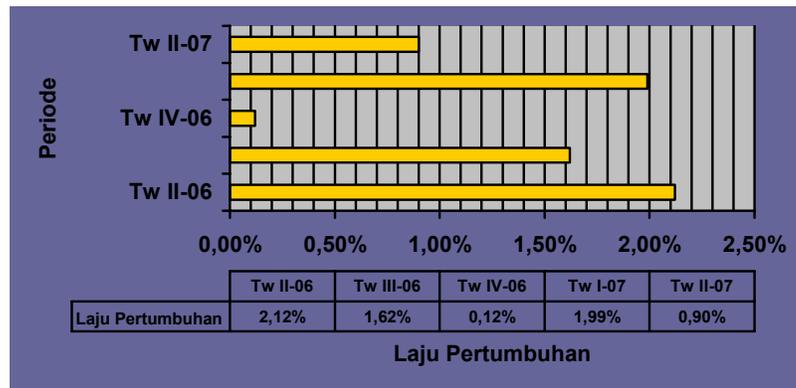
1.9.1.1 Komponen Industri Pengolahan³

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau, komponen industri memiliki nilai terbesar atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000⁴, serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan komponen utama pendukung perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

³ Berdasarkan klasifikasi dari BPS, kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 sektor, yaitu: industri pengilangan minyak bumi, industri pengolahan non-migas, dan industri pengilangan gas alam cair

⁴ Perhitungan dan nilai tambah untuk sub sektor industri besar/ sedang digunakan pendekatan produksi, dan untuk output & nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode deflasi

GRAFIK 1.6 – PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2005 PERIODE 2005 - 2006



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sektor industri menjadi sektor andalan Kota Batam, serta Kabupaten Bintan (semula bernama Kabupaten Kepulauan Riau) dengan kawasan industri Lobam-nya. Mengingat cukup besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah, maka pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem *Free Trade Zone* (FTZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK). Untuk mendukung kegiatan perekonomian khususnya di Kota Batam, maka pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain: fasilitas jalan raya dan jembatan, fasilitas pelabuhan laut dan udara, tenaga listrik dan telekomunikasi, persediaan air bersih, berbagai macam fasilitas umum (hotel, bank, perusahaan asuransi, ekspedisi, pusat perbelanjaan, sekolah, kesehatan, tempat peribadatan, fasilitas olahraga).

Sebagaimana diuraikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan beberapa upaya peningkatan sarana infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2007, diantaranya adalah: pembangunan jalan baru sepanjang 80 km², jembatan sepanjang 748 m² dan lokasinya menyebar di seluruh Kab/Kota. Di samping pembangunan jalan dan jembatan, juga telah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 279 km² dan pada tahun 2007 akan ditambah sebanyak 332 km². Selain itu, untuk peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan aspal sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan sepanjang 21 km² dan pada tahun 2007 akan ditambah sepanjang 20 km². Diharapkan melalui pembangunan jalan dan jembatan tersebut dapat meminimalisasi keterisolasian daerah terpencil dan meningkatkan pelayanan transportasi darat antara beberapa daerah seperti di Lingga dan Natuna.

Adapun rencana pengembangan perekonomian untuk Kab. Karimun pada tahun 2007 terkait dengan sektor industri adalah rencana reklamasi beberapa wilayah yang diperuntukan

untuk kawasan industri shipyard, antara lain di Pulau Baran-Pulau Kera, Tg. Buluh Kasap-Tg. Tiram, Tg. Pengaru-Parit Rampak, dan Tg. Sebatok.

1.9.1.2 Komponen Pertambangan

Sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar kedua pada tw.II-2006 yaitu sebesar 10,33% dimana kontribusi minyak dan gas bumi sebesar 9,07% sementara pertambangan tanpa migas (0,81%) dan penggalian (0,45%) memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan. Adapun daerah yang memberikan kontribusi migas pada PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Perimbangan yang meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan penetapan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penghasil migas berdasarkan Kepmendagri Nomor 36 Tahun 2005 dan adanya peningkatan PAD akibat perbaikan pelayanan di bidang migas. Selain itu, kenaikan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan formula perhitungan DAU yang saat ini telah memperhitungkan luas lautan dan panjang garis pantai yang tertuang dalam Deklarasi Bintang pada bulan September 2006. Sebagai gambaran, pada tahun 2005 pendapatan daerah tercatat sebesar Rp.371,72 miliar, sedangkan pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp.911,15 miliar (meningkat 145,12%).

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka APBD Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 APBD Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai Rp.489 miliar, maka pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp.1,1 triliun dan pada tahun 2007 sebesar Rp.1,56 triliun. Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau menduduki posisi ke-10 berdasarkan jumlah APBD Provinsi secara nasional, dimana posisi terbesar adalah DKI Jakarta dengan jumlah APBD mencapai Rp.21,3 triliun dan yang terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp.362,9 miliar.

Namun demikian, dilihat dari persentase pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2005-2006 terjadi pertumbuhan meskipun *trend* pertumbuhannya cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan pertambangan migas mengalami penurunan dimana pada tw.II-2005 sebesar 0,21%, dan pada tw.III-2005 terjadi peningkatan laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,04%, namun pada tw.IV-2005 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar -1,31%. Kemudian pada tahun 2006 terdapat perbaikan laju pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 0,21% (tw.I-2006); 1,49% (tw.II-2006); 1,27% (tw.III-2006); dan 0,62% (tw.IV-2006).

Di samping Kabupaten Natuna, kontribusi sektor pertambangan juga disumbangkan oleh wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Terdapat 3 (tiga) bahan tambang/galian utama yang dihasilkan di daerah ini antara lain : pertambangan timah, pertambangan granit, dan penggalian

pasir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karimun (data yang diperoleh s/d tahun 2002), produksi pertambangan granit yang tercatat pada tahun 2002 adalah sebanyak 5.103.690.000 m³ dengan jumlah iuran sebanyak Rp.15.774.603.731,- Untuk produksi timah, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 6.237.300 ton. Sementara itu, penggalian pasir darat tercatat sebanyak 1.359.450.000 ton, sedangkan penggalian pasir laut belum ada data yang tersedia.

1.9.1.3 Komponen Perdagangan

Sebagai daerah yang menjadi salah satu kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – *Growth Triangle*), Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai macam keunggulan, diantaranya adalah: letaknya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang berada di jalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya alam. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya tersebut, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Oleh karena itu, sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan di samping sektor-sektor ekonomi lainnya. Daerah yang menjadikan sektor perdagangan menjadi kegiatan ekonomi unggulan diantaranya Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Kontribusi sektor perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan II-2007 adalah sebesar 8,08% yang terbagi dalam 3 sub-sektor, yaitu: sub-sektor perdagangan (6,89%), sub-sektor hotel (0,75%), dan sub-sektor restoran (0,44%).

Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, maka saat ini terdapat 3 (tiga) pemerintahan di Kota ini, yaitu: sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Kota ini memiliki beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia yang masuk ke kota ini dengan bahasa melayu sebagai bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk sektor ekonomi terutama sektor perdagangan yang sebelumnya telah menjadi sektor andalan di daerah ini. Di samping itu, sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan dan ini turut mempengaruhi sub-sektor perdagangan diantaranya sub-sektor hotel dan sub-sektor restoran.

Letak geografis yang strategis pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan menjadi salah satu potensi yang dimiliki Tanjung Pinang untuk turut berperan terhadap pertumbuhan perdagangan. Kegiatan perdagangan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Tanjung Pinang karena terbatasnya tanaman yang dapat tumbuh di daerah yang memiliki tekstur tanah pasir berlempung, seperti tanaman hortikultura, palawija, dan perkebunan. Pada tahun 2001, luas

lahan tanam adalah 448 ha, namun pada tahun berikutnya turun 71 ha karena alih fungsi menjadi daerah permukiman. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan maka sebagian besar kebutuhan pangan tersebut diperoleh dari perdagangan antarpulau. Sayur-sayuran dipasok dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau Pekanbaru. Kebutuhan beras diperoleh dari Padang selain Thailand dan Myanmar, dan barang kelontong dan bahan bangunan disuplai dari Jakarta.

1.9.1.4 Komponen Keuangan

Komponen keuangan memberikan distribusi sebesar 5,54% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau triwulan II-2007. Sub-sektor Bank⁵ memberikan sumbangan sebesar 3,76% dan sub-sektor sewa bangunan sebesar 1,55%. Perkembangan sub-sektor perbankan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik dimana data-data indikator perbankan terus meningkat, antara lain pada: jumlah bank yang beroperasi (bank umum dan BPR), total asset, total Dana Pihak Ketiga (DPK), serta jumlah kredit yang disalurkan.

1.9.1.5 Komponen Pertanian

Sebagai daerah yang 96%-nya merupakan perairan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan. Hal ini ditunjukkan dari besarnya kontribusi sub-sektor perikanan pada pembentukan PDRB daerah yaitu sebesar 4,99% pada triwulan II-2007 dengan rincian sub sektor perikanan sebesar 3,59%, sub sektor peternakan sebesar 0,78%, sub sektor perkebunan sebesar 0,30%, sub sektor tanaman pangan sebesar 0,27%, dan sub sektor kehutanan sebesar 0,06%. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala pengembangan potensi tersebut seperti masih maraknya praktek *illegal fishing* dan *illegal logging* serta rusaknya terumbu karang yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem sehingga menurunkan kualitas alam itu sendiri.⁶

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk memajukan taraf hidup dan perekonomian kalangan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Kepri. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri mengalokasikan dananya untuk penguatan modal kalangan nelayan, tambak, dan budi daya ikan. Adapun kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2007 antara lain:

- Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan budidaya,
- Penguatan modal nelayan dan pembudidaya ikan melalui bantuan dana bergulir,

⁵ meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank umum pemerintah & swasta serta BPR

⁶ Disampaikan pada laporan kegiatan di daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah – RI

- Pembangunan pabrik es,
- Revitalisasi pelabuhan perikanan,
- Revitalisasi TPI
- DED pelabuhan perikanan.

Salah satu daerah Dati-II di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan adalah Kabupaten Karimun, dimana di samping memiliki lahan yang subur, sebesar 87% atau seluas 6.460 km² wilayah tersebut dikelilingi oleh laut sehingga sangat potensial untuk pengembangan industri yang berbasis perikanan, antara lain: budidaya rumput laut, tambak udang, pengolahan tepung ikan, dan kerambah ikan. Sebagian hasil laut yang dihasilkan tersebut sangat mendukung untuk pengembangan peternakan guna kelangsungan pakan ternak itik di daerah tersebut. Berdasarkan PDRB Karimun pada tahun 2003, sumbangan sub-sektor perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,79% atau sebesar Rp.60,04 miliar. Untuk terus meningkatkan sektor perikanan di wilayah Karimun, maka Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki program dan kegiatan pembangunan, yang terdiri dari:

- a. Penguatan modal untuk petani ikan/nelayan melalui pinjaman lunak swamitramina, dengan total anggaran Rp.3 miliar.
- b. Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan, dengan total anggaran Rp.1 miliar.
- c. Pencetakan lahan tambak udang dan operasional 5 Ha, dengan total anggaran Rp.4 miliar.
- d. Bantuan pengadaan jaring udang dan jaring tenggiri bagi masyarakat pesisir, dengan total anggaran Rp.1 miliar.
- e. Dukungan peralatan untuk balai benih udang, dengan total anggaran Rp.500 juta.

Sementara itu, Kabupaten Bintan juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan peternakan. Untuk itu, pada tahun 2006 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kepri telah mengajukan beberapa program terkait sektor tersebut diatas. Antara lain adalah program penggemukan 1.000 ekor sapi unggulan dengan alokasi dana mencapai Rp.10 miliar, serta pengembangan budidaya sayuran kualitas ekspor.

Rencana Pemerintah Kota Batam untuk mengembangkan potensi perikanan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan pengembangan pelabuhan perikanan di Pulau Nipah antara PT. Mandra Guna Gema Sejati dengan Pemko Batam di Kantor Menteri Perikanan dan Kelautan – Jakarta, yang mencakup rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan, dan lingkungan untuk kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu juga PT. Mandra Guna Gema Sejati akan menyiapkan dan memfasilitasi

pembangunan sarana prasarana penunjang pelabuhan perikanan dan fasilitas komersil, fasilitas pembinaan nelayan, pembangunan fasilitas kantor pelayanan fungsi pemerintahan, membangun tempat pelelangan dan pembongkaran ikan sesuai kapasitas kebutuhan. Di samping itu juga membangun fasilitas mutu hasil perikanan, menyusun program pengembangan kawasan bahari di Bareleng secara terpadu serta menyampaikan laporan perkembangan pembangunan dan operasional pelabuhan secara periodik kepada Pemko Batam.

1.10 Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Kerja Batam

Total ekspor non-migas dari wilayah Batam selama periode triwulan II-2007 (Januari s/d Mei 2007) sebesar US\$. 2.917.187.458 dengan volume ekspor berjumlah 7.591.489.327 kg. Komponen yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah komponen *Capital Good – Except Transport Equipment* (US\$.942.375.813), sedangkan komponen yang memiliki volume ekspor terbesar adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified – Primary* (6.892.149374 kg).

Sementara itu total impor non-migas ke wilayah Batam selama periode Januari s/d Mei 2007 sebesar US\$.3.347.823.096 dengan volume impor berjumlah 1.157.935.377 kg. Komponen yang memiliki nilai serta volume impor terbesar tersebut adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified (Processed)*. Total impor yang tercatat di wilayah Batam bernilai tidak terlalu besar karena status Batam sebagai wilayah khusus (sebagai wilayah *Free Trade Zone – FTZ*, yang selanjutnya menjadi *Bonded Zone Plus – BZP*, dan saat ini sebagai *Special Economic Zone – SEZ*) menyebabkan proses masuknya barang ke dalam wilayah pabean RI melalui Batam tidak dicatat sebagai impor.

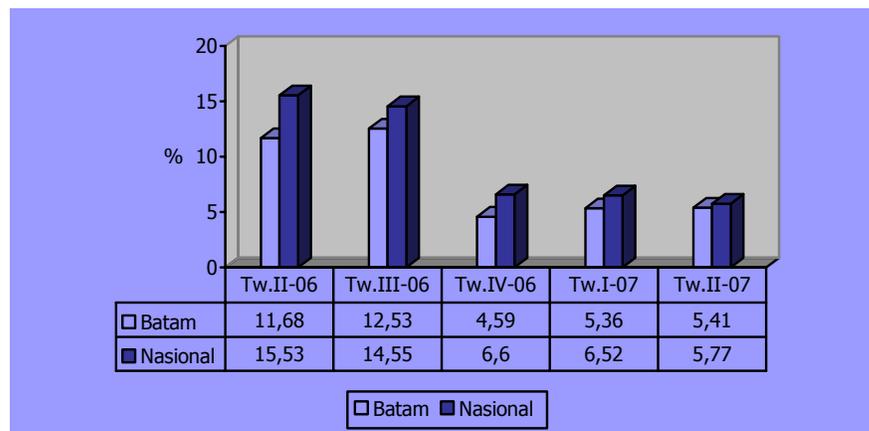
Secara nasional, nilai ekspor bulan Mei 2007 mencapai US\$.7.953 juta dimana nilai ekspor nasional pada bulan sebelumnya tercatat sebesar US\$.7.953 juta. Sedangkan selama bulan Januari 2007 nilai impor Indonesia mencapai US\$.6.128 juta dimana nilai impor Indonesia pada Desember 2006 tercatat sebesar US\$. 5.614 juta.

Bab 2 Perkembangan Inflasi⁷

2.1 KONDISI UMUM

Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang diukur Kota Batam secara kuartalan sampai dengan triwulan II-2007 adalah sebesar 1,06% (qtq), atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan I-2007 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,42%. Secara bulanan, inflasi terbesar terjadi pada bulan Juni sebesar 0,04%, namun pada dua bulan sebelumnya untuk Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi masing pada bulan April sebesar -0,03% dan bulan Mei sebesar -0,35%. Laju inflasi Batam secara tahunan pada triwulan II-2007 tercatat sebesar 5,41% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan laju inflasi nasional triwulan II-2007 sebesar 5,77% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau relatif lebih stabil, dimana inflasi kumulatif selama tahun 2006 sampai dengan triwulan I-2007 dapat mencapai *single digit* setelah pada tahun 2005 mencapai *double digit* sebagai akibat kenaikan BBM.

GRAFIK 2.1 – PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN BATAM & NASIONAL



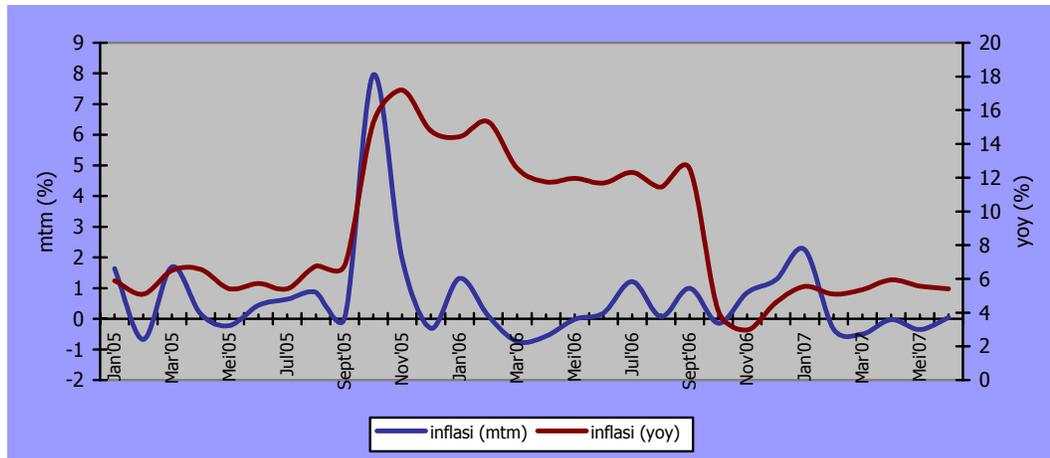
Sumber: Badan Pusat Statistik

Cukup stabilnya laju inflasi tersebut tercermin pada rendahnya inflasi bulanan selama triwulan II-2007, bahkan pada bulan April dan Mei 2007 terjadi deflasi. Hal tersebut tentunya

⁷ Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus (dikutip dari Boediono, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5; Teori Moneter, BPFE-1982 Bab VIII*)

dapat berpengaruh pada kondisi perekonomian makro yang diharapkan akan memberikan perbaikan ke depannya.

GRAFIK 2.2 – PERKEMBANGAN INFLASI & BULANAN KOTA BATAM



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3/2004 disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mulai Juli 2005, BI mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru konsisten dengan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Pengimplementasian kerangka kerja tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola (*governance*) kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi Kota Batam diukur dengan menggunakan nilai variabel Indeks Harga Konsumen (IHK)⁸ yang berfungsi untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nilai IHK secara nasional dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 – 397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

TABEL 2.1 - LAJU INFLASI BATAM TAHUN 2007

NO	KELOMPOK	BULANAN (MtM)			TAHUNAN (YoY)		
		APR	MEI	JUN	APR	MEI	JUN
	UMUM	-0.03	-0.35	0.04	5.95	5.57	5.41
1	Bahan Makanan	-0,48	-13,68	-0,56	14,45	13,66	12,08
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	-0,18	0,09	0,35	5,42	5,32	5,57
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	0,40	0,08	0,46	1,21	1,09	1,54
4	Sandang	0,60	-0,33	0,13	2,66	1,48	3,01
5	Kesehatan	0,31	0,36	0,23	2,08	2,45	2,36
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	-0,11	0,00	0,17	15,46	14,98	15,33
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,01	0,00	0,00	0,12	0,76	0,76

Sumber: Badan Pusat Statistik

⁸ Uraian IHK selengkapnya dapat dilihat di Boks - I

2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI TAHUNAN (yoy) BATAM

Laju inflasi tahunan Kota Batam pada triwulan II-2007 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan I-2007, yaitu dari 5.36% (yoy) menjadi 5.41%. Sedangkan bila dibandingkan dengan triwulan I-2006, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada laju pergerakan harga kelompok barang dan jasa di Kota Batam. Hal ini memberikan stimulus positif bagi perkembangan ekonomi daerah ke depan untuk dapat tumbuh lebih tinggi.

TABEL 2.3 - PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN KOTA BATAM

KELOMPOK	2005 – 2006						2007			
	2006		2006		2006		2007		2007	
	Tw.II	Sumb	Tw.III	Sumb	Tw.IV	Sumb	Tw.I	sumb	Tw.II	sumb
Bahan Makanan	12.19	3.11	14.87	3.79	10.23	2.61	12.34	3.15	(0,56)	0,16
Makanan Jadi	8.06	1.44	10.45	1.87	5.15	0.92	5.56	0.99	0,35	0,06
Perumahan	6.35	1.63	4.94	1.27	0.74	0.19	0.83	0.21	0,45	0,11
Sandang	5.07	0.32	2.11	0.14	2.35	0.15	2.94	0.19	0,13	0,01
Kesehatan	3.84	0.17	2.57	0.11	2.20	0.09	1.88	0.08	0,24	0,01
Pendidikan	7.86	0.48	15.63	0.95	15.41	0.93	15.69	0.95	0,16	0,01
Transportasi	28.40	4.06	28.69	4.09	0.49	0.07	0.86	0.12	0,00	0,00
UMUM	11.68		12.53		4.59		5.36		5,74	

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Inflasi Kota Batam pada triwulan II-2007 terutama disebabkan oleh kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, dan kelompok makanan jadi yang masing-masing memberikan sumbangan inflasi tahunan sebesar 0,16%, 0,11%, dan 0.06% (tabel 2.3).

TABEL 2.4 - PERKEMBANGAN INFLASI & SUMBANGANNYA

KELOMPOK/SUB KELOMPOK	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
I. BAHAN MAKANAN	10.23	2.61	12.34	3.14
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	20.49	1.17	15.41	0.89
Daging dan Hasil-hasilnya	10.69	0.36	8.56	0.32
Ikan Segar	17.98	0.61	14.61	0.50
Ikan Diawetkan	5.70	0.04	2.61	0.03
Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	5.14	0.12	2.96	0.07
Sayur-sayuran	8.55	0.18	18.74	0.42
Kacang-kacangan	8.19	0.10	2.54	0.03
Buah-buahan	0.77	0.02	11.51	0.26
Bumbu-bumbuan	2.09	0.04	13.64	0.30
Lemak dan Minyak	5.43	0.08	17.20	0.29
Bahan Makanan Lainnya	4.72	0.01	6.12	0.03
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	5.15	0.92	5.56	0.99
Makanan Jadi	1.37	0.15	4.71	0.49
Minuman yang Tidak Beralkohol	7.49	0.24	3.97	0.13
Tembakau dan Minuman Beralkohol	9.28	0.42	7.43	0.33
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	0.74	0.19	0.83	0.21
Biaya Tempat Tinggal	0.58	0.08	0.62	0.08
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	0.01	0.00	0.21	0.01
Perlengkapan Rumah Tangga	2.21	0.05	3.50	0.07
Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.77	0.12	3.04	0.09
IV. SANDANG	2.35	0.15	2.94	0.18
Sandang Laki-laki	1.46	0.03	1.46	0.03
Sandang Wanita	2.15	0.05	2.16	0.04
Sandang Anak-anak	2.43	0.03	2.76	0.03

Barang Pribadi dan Sandang Lain	3.65	0.05	5.96	0.08
V. KESEHATAN	2.20	0.09	1.88	0.08
Jasa Kesehatan	3.73	0.04	3.74	0.04
Obat-obatan	0.69	0.00	0.01	0.00
Jasa Perawatan Jasmani	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	2.31	0.05	1.91	0.04
VI. PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	15.41	0.93	15.69	0.97
Jasa Pendidikan	30.75	0.93	30.76	0.93
Kursus-kursus/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	0.00
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	-0.08	0.00	-0.08	0.00
Rekreasi	1.34	0.02	2.11	0.04
Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0.49	0.07	0.86	0.12
Transpor	0.38	0.04	1.05	0.09
Komunikasi dan Pengiriman	0.00	0.00	0.00	0.00
Sarana dan Penunjang Transpor	2.24	0.02	2.24	0.03
Jasa Keuangan	5.92	0.01	1.70	0.00
UMUM	4.59		5.36	

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 12.34% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi sub-kelompok sayur-sayuran yang tercatat 18.74% dan memberikan sumbangan sebesar 0.42%. Sementara itu, laju inflasi sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya sebesar 15.41% dengan sumbangan sebesar 0.89%.

Kenaikan IHK kelompok bahan makanan secara tahunan disebabkan oleh beberapa komoditas yaitu sayur-sayuran (nangka muda, buncis, terong, kentang), lemak dan minyak (minyak goreng), padi-padian (beras), dan ikan segar. Kenaikan IHK kelompok pendidikan terutama disebabkan oleh jasa pendidikan (SD, SMP, SMA, dan kelompok bermain).

Apabila dilihat sumbangan inflasi menurut komoditasnya, bahan makanan adalah komoditas yang memberikan sumbangan terbesar pada inflasi Batam yaitu sebesar 3.14% terutama berasal dari komoditas padi-padian, ikan segar, dan sayur-sayuran. Sementara itu, kelompok makanan jadi memberikan sumbangan inflasi sebesar 0.99% terutama berasal dari komoditas makanan jadi.

2.3 SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU)⁹

Pelaksanaan survei kegiatan dunia usaha bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, dimana hasil survei merupakan salah satu pendekatan/proksi kegiatan usaha, di samping sebagai salah satu komponen/variabel pembentuk *leading economy indicator*. Adapun responden pada survei tersebut adalah perusahaan yang termasuk menengah ke atas berdasarkan nilai produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya. Pengambilan sampel untuk kegiatan ini dilakukan dengan metode *stratified purposive sampling*. Dimana stratifikasi berdasarkan sektor ekonomi,

⁹ pelaksanaan survey kegiatan dunia usaha (SKDU) dilakukan setiap triwulanan

daerah/regional, nilai usaha yang diukur dari produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya.

Secara umum, kegiatan dunia usaha pada tw.II-2007 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (diwakili oleh Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang) sedikit mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami berbagai tantangan akibat kondisi perekonomian makro yang kurang kondusif. Saat ini perekonomian Indonesia umumnya, dan Kepulauan Riau khususnya berangsur-angsur mulai menunjukkan pemulihan kearah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada jawaban responden dimana hampir semua sektor sudah mulai meningkatkan produksinya yang sebelumnya sebagian besar responden merasakan dampak yang cukup berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005. Berdasarkan hasil SKDU, para pengusaha di wilayah Batam dan Tanjung Pinang memperkirakan laju inflasi pada tw.II-2007 secara rata-rata sebesar 6% (y-o-y).

Bab 3

Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1 KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian khususnya perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil terhadap tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 secara triwulanan meningkat sebesar 0,90% (qtq) terhadap triwulan I-2007. Sementara itu, meskipun persentase peningkatan jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah kerja KBI Batam pada triwulan II-2007 lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya namun beberapa indikator-indikator perbankan, seperti: total aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit oleh perbankan terus mengalami pertumbuhan. Di bidang sistem pembayaran, transaksi tunai selama tw.II-2007 di Provinsi Kepulauan Riau mengalami *net outflow* sebesar Rp.168,11 miliar, sedangkan transaksi non-tunai melalui kegiatan kliring di wilayah kerja KBI Batam mencapai Rp.2,30 T miliar (108.413 lembar).

3.2 MONETER

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia serta prospek ekonomi moneter ke depan, pada tw.II-2007 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate dari 9,00% (6 Maret 2007) menjadi 8,75% (8 Mei 2007), 8,50% (7 Juni 2007) dan 8,25% (5 Juli 2007). Langkah yang dilakukan oleh otoritas moneter ini masih dalam kerangka upaya pencapaian sasaran inflasi ke depan yaitu $6\pm 1\%$ untuk tahun 2007 dan $5\pm 1\%$ untuk tahun 2008. Penurunan BI Rate didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan konsistensi arah kebijakan moneter yang ditempuh BI. Secara nasional, beberapa indikator ekonomi menunjukkan akselerasi perekonomian yang terus berlanjut, dimana sumber pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari ekspor dan perbaikan permintaan domestik, khususnya investasi yang mulai tumbuh. Di samping itu, kinerja ekspor masih tumbuh cukup tinggi yang didukung oleh sektor pertanian dan industri.

TABEL 3.1 – PERKEMBANGAN UANG GIRAL & KUASI
(dalam miliar rupiah)

Ket	2006			2007	
	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II
Uang Giral	4.435,88	4.988,06	5.086,04	5.057,69	5.602,99
Giro	4.435,88	4.988,06	5.086,04	5.057,69	5.602,99
Uang Kuasi	6.104,83	6.146,31	7.334,23	7.404,45	7.192,08
Tabungan	3.089,24	3.211,56	3.828,18	3.844,02	3.995,73
Deposito	2.725,13	2.934,75	3.506,05	3.560,43	3.196,35
Total	10.450,71	11.134,37	12.420,27	12.462,14	12.795,07

Dana masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang disimpan dalam bentuk giral dan kuasi menunjukkan peningkatan. Jumlah uang giral pada tw.II-2007 meningkat sebesar Rp.545,35 miliar (10,78%) dibandingkan tw.II-2007. Peningkatan jumlah uang kuasi tersebut tidak diiringi oleh peningkatan uang kuasi dimana sampai dengan tw.II-2007 jumlah uang giral yang dihimpun perbankan di Provinsi Kepulauan Riau menurun sebesar Rp.212,37 miliar (-2,87%). Secara total jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar Rp.332,93 miliar (2,67%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

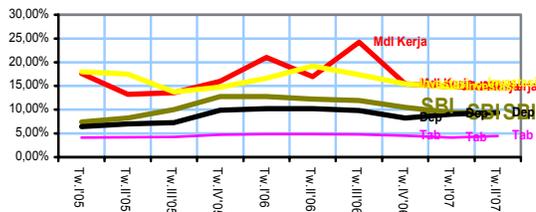
Suku bunga simpanan menunjukkan pergerakan yang cenderung menurun setelah sebelumnya tingkat suku bunga perbankan sempat meningkat menjelang awal tahun 2006. Pada tw.II-2007 rata-rata suku bunga simpanan berjangka 3 bulan mencapai 9,05% dan sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,25%, tingkat suku bunga tabungan sebesar 4,12%, dan tingkat suku bunga kredit modal kerja serta kredit investasi masing-masing sebesar 14,81% dan 14,78%. Perkembangan suku bunga perbankan di wilker KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2 – PERKEMBANGAN SUKU BUNGA (%)

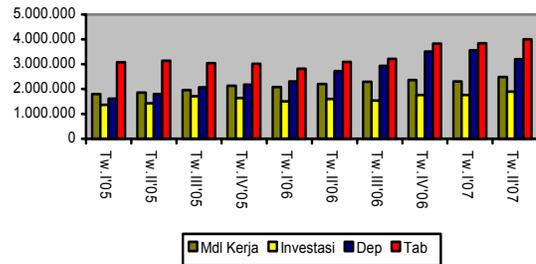
Keterangan	2006			2007	
	Tw II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw II
SBI 1 bulan	12,25	11,94	10,50	9,38	8,25
DPK *)					
Tabungan	4,85	4,81	4,55	4,12	4,49
Dep 3 bln	10,25	9,82	8,25	9,05	9,38
Kredit *)					
Mdl Krj	16,99	16,00	15,48	14,81	14,66
Investasi	19,20	17,34	15,46	14,78	15,54

Sumber : Bank Indonesia *) angka diperbaiki

Grafik 3.1a Perkembangan Tingkat Suku Bunga



Grafik 3.1b Perkembangan DPK dan Kredit



Berdasarkan grafik diatas, atas dasar nilai rata-rata, terjadi penurunan suku bunga simpanan dalam bentuk tabungan, namun sebaliknya, suku bunga kredit justru mengalami peningkatan khususnya pada kredit investasi.

3.3 PERBANKAN

Indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.II-2007 menunjukkan peningkatan. Jumlah jaringan kantor Bank Umum sebanyak 40 kantor pada triwulan laporan, sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 11 (sebelas) kantor. Selain itu, terdapat 3 BPR yang telah memperoleh ijin prinsip dan 1 BPR telah mendapatkan izin usaha. Masing-masing BPR yang telah memperoleh ijin prinsip tersebut adalah 1 BPR berlokasi di Kota Batam, 1 BPR berlokasi di Kota Tanjung Pinang, dan 1 BPR berlokasi di Kabupaten Bintan, sedangkan 1 BPR yang telah mendapatkan izin usaha berlokasi di Batam.

Total *asset*, jumlah dana masyarakat yang dihimpun serta total kredit yang diberikan oleh perbankan menunjukkan *trend* peningkatan jika dibanding tw.I-2007 meskipun dengan persentasi yang kurang signifikan. Sementara itu, kekhawatiran beberapa kalangan atas perubahan batas maksimal jumlah simpanan masyarakat yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar maksimal Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sejak tanggal 22 Maret 2007 pada kenyataannya tidak menunjukkan terjadinya pergeseran jumlah rekening simpanan pada perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan cukup tinggi.

TABEL 3.3 – PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN*(juta rupiah)*

Indikator	Periode				
	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw. II
1. Jaringan BU	38	38	38	39	40
a. Batam	24	24	26	27	27
b. Tj. Pinang	11	11	11	11	11
c. Karimun	2	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1
2. Jaringan BPR	10	10	11	11	12
a. Batam	7	7	8	8	9
b. Tj. Pinang	2	2	2	2	2
c. Karimun	1	1	1	1	1
3. Total Asset	12.173.496	13.115.164	14.592.742	14.617.078	15.106.938
a. Batam	9.131.399	9.421.420	9.966.611	10.181.336	10.478.486
b. Tj. Pinang	2.240.879	2.650.857	3.511.073	3.320.778	3.730.356
c. Dati II lain	345.781	1.042.887 *)	1.115.058	1.114.964	898.096
4. Total DPK	10.250.252	11.134.372	12.420.268	12.462.137	12.795.065
a. Batam	7.197.490	7.606.786	7.979.175	8.159.309	8.323.007
b. Tj. Pinang	3.052.762	2.477.426	3.352.073	3.182.499	3.562.510
c. Dati II lain	455.437	1.050.160	1.089.020	443.931	909.548
5. Total Kredit	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064	7.228.680
a. Batam	5.302.606	5.266.622	5.588.850	5.622.513	6.025.843
b. Tj. Pinang	657.171	819.222	897.686	898.102	985.475
c. Dati II lain	158.485	172.336	179.819	192.449	217.362
6. LDR (%)	59,69	56,21	53,67	53,87	56,50
a. Batam	72,67	69,24	70,04	68,91	72,40
b. Tj. Pinang	29,43	33,07	26,78	28,22	27,66
c. Karimun	36,62	39,50	39,10	33,11	36,62
d. Natuna	7,08	5,07	5,04	6,72	11,75
7. NPLs (%)	5,43	4,83	4,34	4,46	4,28
a. Batam	2,01	3,62	4,43	4,19	4,01
b. Tj. Pinang	9,11	12,76	3,66	5,95	5,87
c. Karimun	4,18	4,87	5,98	6,86	6,28
d. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

Sumber : Bank Indonesia

Ket: *) termasuk Natuna

Kinerja perbankan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2007 terhitung baik, dimana asset, DPK, kredit dan rasio LDR maupun NPL masih berada dalam batas toleransi. Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih besar daripada penghimpunan dana menunjukkan sudah membaiknya fungsi intermediasi oleh perbankan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan LDR pada triwulan II-2007 sudah mulai menunjukkan peningkatan, dimana tingkat LDR bank umum pada triwulan laporan sebesar 56,50%. Peningkatan penyaluran kredit oleh dunia perbankan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dunia usaha, terutama yang pendanaannya berasal dari perbankan.

Sementara itu, dari sisi kolektibilitas kredit juga menunjukkan indikator yang menggembarakan dimana terjadi penurunan pada tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di wilayah kerja KBI Batam, yaitu dari 4,46% pada tw.I-2007 menjadi 4,28% pada triwulan laporan. Penurunan NPLs tersebut terutama disumbangkan dari tingkat NPLs perbankan di

daerah Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun. Penurunan total nilai NPL di wilayah kerja KBI Batam ini dipengaruhi oleh performa dunia usaha yang sudah mulai membaik.

Secara geografis, dana simpanan yang masuk ke dunia perbankan di wilayah kerja KBI Batam porsi terbesar berasal dari kota Batam sebesar Rp.8,32 triliun atau 65,05% dari seluruh dana masyarakat yang berhasil dihimpun di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pula kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar mengalir ke kota Batam sebesar Rp.6,02 triliun atau 83,36% dari seluruh total kredit yang disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

3.3.1 Perkembangan Total *Asset* Bank Umum

Kondisi industri perbankan menunjukkan pertumbuhan, seperti tercermin pada pertumbuhan total *asset* bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang didukung oleh pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit. Sampai dengan tw.II-2007, total *asset* bank umum mencapai Rp.15,11 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,35% dibanding tw.I-2007 yang tercatat sebesar Rp. 14,62 triliun, sedangkan secara tahunan (*y-o-y*) terdapat peningkatan sebesar 24,10%.

Komposisi total *asset* perbankan di wilayah kerja KBI Batam didominasi oleh kelompok Bank Swasta dan kelompok Bank Pemerintah. Kelompok Bank Swasta memiliki total *asset* sebanyak Rp.8,43 triliun atau 54,67% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu kelompok Bank Pemerintah mengumpulkan *asset* sebanyak Rp.6,98 triliun atau sama dengan 45,33% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (termasuk BPD Riau).

Bila dilihat *trend* pertumbuhan total *asset* secara tahunan, kelompok Bank Swasta menunjukkan peningkatan total *asset* yang dimilikinya sebesar 11,60% terhadap triwulan I-2007 (Rp.5,36 triliun). Sedangkan total *asset* pada kelompok Bank Pemerintah justru menurun sebesar -1,20%.

Berdasarkan Dati II, kegiatan perekonomian dan perbankan masih terkonsentrasi di Kota Batam, dimana jumlah total *asset* perbankan sebagian besar masih tetap terhimpun di Kota Batam. Total *asset* perbankan yang ada di Kota Batam pada tw.II-2007 sebesar Rp.10,48 triliun atau 69,36% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sedangkan total *asset* yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Tanjung Pinang sebesar Rp.3,73 triliun atau 24,69% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sementara itu total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau (Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Natuna) sebesar Rp.898 miliar (5,94%).

TABEL 3.4 – PERKEMBANGAN TOTAL ASSET PERBANKAN*(miliar rupiah)*

Lokasi	2006				2007		Pertumb (%)	
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	8.161	9.131	9.421	9.967	10.181	10.478	2,92	14,75
Wil.Tj.Pinang	1.907	2.241	2.651	3.511	3.321	3.730	12,33	66,44
Kepln Riau*)	491	801	1.043	1.115	1.115	898	-19,45	12,11
Total	10.559	12.174	13.115	14.593	14.617	15.106	3,35	24,08

Sumber : Bank Indonesia

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Adapun peningkatan total *asset* terbesar triwulanan (q-t-q) terdapat di wilayah Tanjung Pinang (12,15%), demikian pula secara tahunan (y-o-y) peningkatan terbesar juga terdapat di Tanjung Pinang (66,44%). Bila dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya, terlihat bahwa wilayah Kepulauan Riau mengalami penurunan asset yang cukup signifikan sebesar -19,45%.

3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Sampai dengan tahun 2007, jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Umum masih terus mengalami pertumbuhan, dimana pada triwulan II-2007 jumlah dana masyarakat mencapai Rp.12,79 triliun atau meningkat sebesar Rp.332 milyar (2,67%) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,46 triliun.

Dibandingkan dengan triwulan I-2007 giro merupakan jenis simpanan yang mengalami pertumbuhan terbesar yang mencapai 14,51% (Rp.709 miliar) dan diikuti oleh tabungan sebesar 5,37% (Rp.203 triliun). Sedangkan simpanan dalam bentuk tabungan justru mengalami penurunan sebesar -2,09% (Rp.68 miliar).

Selain itu, indikator tersebut di atas juga menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran minat masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk menghimpun dana-nya pada jenis simpanan yang *liquid* dimana pada periode sebelumnya simpanan masyarakat di wilayah kerja KBI Batam dalam bentuk deposito mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun 2006 sebesar 54, 61%. Secara nominal simpanan giro masih memiliki porsi terbesar sebesar 43,79%. Dominasi sektor industri dan sektor perdagangan pada perekonomian Kota Batam turut mempengaruhi jenis transaksi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan masyarakat akan dana likuid serta transaksi ekonomi yang membutuhkan waktu singkat menyebabkan simpanan berbentuk giro memiliki porsi terbesar terhadap total simpanan masyarakat di perbankan.

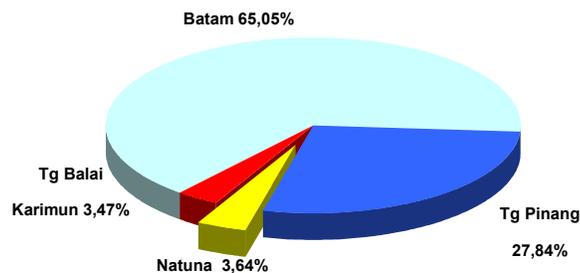
Trend perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam dari tw.I-2005 sampai dengan tw.I-2007 dapat dilihat tabel 3.5.

TABEL 3.5 – PENGHIMPUNAN DANA BANK UMUM*(Juta Rupiah)*

Keterangan	2006				2007	
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2
Jenis Simpanan:	8.552.495	10.250.252	11.134.372	12.420.268	12.462.137	12.795.065
- Giro	3.429.726	4.435.878	4.988.060	5.086.038	5.057.691	5.602.987
- Tabungan	2.819.911	3.089.243	3.211.560	3.828.176	3.844.020	3.999.732
- Deposito	2.302.858	2.725.131	2.934.752	3.506.054	3.560.426	3.196.346
Jenis Bank:						
Bank Pemerintah	3.191.790	3.595.272	3.464.724	3.897.504	3.893.517	4.009.818
- Giro	997.127	1.220.980	1.037.079	1.233.846	1.160.015	1.219.522
- Tabungan	1.423.278	1.540.704	1.560.522	1.770.691	1.836.480	1.921.682
- Deposito	771.385	833.588	867.123	892.967	897.022	868.614
BPD Riau	809.241	1.263.075	1.780.649	2.237.652	1.949.614	1.578.679
- Giro	572.038	986.016	1.445.086	1.325.392	1.077.597	867.026
- Tabungan	127.317	135.654	165.738	355.596	196.597	232.174
- Deposito	109.886	141.405	169.825	556.664	675.420	479.479
Bank Swasta	4.551.464	5.391.905	5.888.999	6.285.112	6.619.006	7.206.568
- Giro	1.860.561	2.228.882	2.505.895	2.526.800	2.820.079	3.516.439
- Tabungan	1.269.316	1.412.885	1.485.300	1.701.889	1.810.943	1.841.876
- Deposito	1.421.587	1.750.138	1.897.804	2.056.423	1.987.984	1.848.253

Sumber : Bank Indonesia Batam

Kelompok Bank Swasta masih mendominasi peta perbankan di wilayah kerja KBI Batam dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Swasta sebesar Rp.7,21 triliun atau 56,32% dari total DPK di wilayah kerja KBI Batam. Demikian pula pertumbuhan DPK terbesar terdapat pada kelompok Bank Swasta dibandingkan kelompok Bank Pemerintah. Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh kelompok Bank Swasta sebesar 8,88% (q-t-q), sedangkan kelompok Bank Pemerintah meningkat sebesar 2,99%. Sementara itu, BPD Riau justru mengalami penurunan penghimpunan DPK sebesar 370 miliar (-19,03%). Sedangkan dari segi geografis kota Batam masih tetap sebagai kontributor terbesar dari penghimpunan DPK yaitu sebesar Rp.8,32 triliun (65,05%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar Rp.3,56 triliun (27,84%), Natuna sebesar Rp.465 miliar (3,64%) dan Tanjung Balai Karimun sebesar Rp.444 miliar (3,47%).

GRAFIK 3.2 – PERBANDINGAN TOTAL DPK BANK UMUM TRIWULAN I-2007*Sumber : Bank Indonesia*

3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan II-2007 meningkat sebesar Rp.1,11 triliun atau tumbuh sebesar 18,15% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006 (yoy). Namun pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan persentase pertumbuhan kredit tahun 2005 – 2006 yang mencapai 21,22%.

Pelemahan penyaluran kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh melemahnya kemampuan masyarakat untuk menyerap dana kredit yang dikucurkan perbankan serta tekanan suku bunga kredit yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2006. Meskipun demikian, seiring dengan penurunan BI Rate yang mencapai 8,25% (per 5 Juli 2007) yang diikuti oleh penurunan suku bunga penjaminan dan suku bunga simpanan, juga mempengaruhi penetapan suku bunga kredit meskipun masih sangat terbatas.

Jika dibandingkan dengan tw.I-2007, kredit yang disalurkan oleh Bank Umum meningkat sebesar Rp.515,62 miliar (7,68%), dimana pertumbuhan terbesar terdapat pada kelompok Bank Swasta (23,31%) sedangkan kelompok Bank Pemerintah meningkat sebesar 13,49%. Jumlah penyaluran kredit oleh Bank Umum pada triwulan laporan meningkat terhadap triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hal tersebut berdampak pada peningkatan tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Umum yaitu dari 53,87% (tw.I-2007) menjadi 56,50% (tw.I-2007).

TABEL 3.6 – PERKEMBANGAN OUTSTANDING KREDIT BANK UMUM
(dalam miliar rupiah)

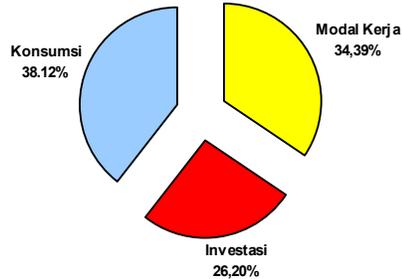
Keterangan	2006				2007	Prtnbn (y-0-y)
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw. I	Tw.2	
TOTAL	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064	7.228.680	18,15%
- Bank Pemerintah*)	3.216.364	3.256.116	3.357.758	3.410.296	3.650.233	13,49%
- Bank Swasta	2.901.898	3.002.064	3.308.597	3.302.768	3.578.447	23,31%

Sumber : Bank Indonesia

*) termasuk BPD Riau

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi sebesar Rp.2,89 triliun atau 39,40% dari total kredit yang diberikan. Sedangkan kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp.2,49 triliun (34,39%) dan Rp.1,89 triliun (26,20%). Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.3.

GRAFIK 3.3
KOMPOSISI PENYALURAN KREDIT DI WILKER
KBI BATAM TRIWULAN II-2007



Kelompok kredit konsumsi memiliki porsi terbesar pada penyaluran kredit Bank Umum pada tw.II-2007. Sementara itu, porsi terkecil

dimiliki oleh kelompok kredit investasi yaitu sebesar 26,20% dimana besaran ini mengalami penurunan terhadap triwulan sebelumnya. Dari segi pertumbuhan, peningkatan jumlah kredit terbesar pada tw.II-2007 terdapat pada kredit untuk jenis kredit modal kerja yang meningkat sebesar Rp.182,55 miliar atau 7,92% terhadap tw.I-

2007. Sementara itu kredit investasi meningkat sebesar Rp.129,74 miliar (7,35%). Sedangkan kredit konsumsi meningkat sebesar Rp.203,33 miliar (7,69%). Peningkatan pembiayaan kredit modal kerja oleh bank umum menunjukkan bahwa masih terdapat prospek dan potensi bagi dunia perbankan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha.

TABEL 3.7 – PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BANK UMUM TRIWULAN I-2007
(miliar rupiah)

No	KETERANGAN	2006					2007
		Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	
1	Kredit atas Jenis:	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064	7.228.680	
	- Modal kerja	2.199.868	2.299.214	2.366.633	2.303.606	2.486.151	
	- Investasi	1.596.120	1.528.315	1.758.377	1.764.400	1.894.140	
	- Konsumsi	2.322.274	2.430.651	2.541.345	2.645.058	2.848.389	
2	Kredit atas Sektor Ek:	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064	7.228.680	
	- Pertanian	151.213	168.031	181.319	183.050	183.634	
	- Pertambangan	53.657	29.922	24.901	19.656	44.378	
	- Industri	893.615	844.595	775.082	728.129	728.405	
	- Listrik, gas dan air	4.422	5.002	4.867	14.096	18.595	
	- Konstruksi	589.123	585.052	586.819	549.724	600.050	
	- Perdagangan	1.384.811	1.468.010	1.575.983	1.600.170	1.704.009	
	- Pengangkutan	134.863	133.480	141.006	139.259	186.186	
	- Jasa dunia usaha	517.172	525.683	762.979	759.419	844.789	
	- Jasa sosial	63.490	63.520	64.733	67.472	64.209	
	- Lainnya	2.325.896	2.434.885	2.548.666	2.652.089	2.854.425	

Sumber : Bank Indonesia

Penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk konsumsi. Meskipun demikian dari sisi pertumbuhan kredit konsumsi masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit modal kerja. Data ini dapat menunjukkan sebagian besar DPK yang masuk ke dunia perbankan disalurkan kembali ke masyarakat untuk keperluan konsumsi. Salah satu sebab besarnya jumlah kredit untuk konsumsi ini adalah karena perbankan menilai penyaluran kredit untuk konsumsi relatif lebih aman dan *feasible* untuk dibiayai.

Kredit yang disalurkan di luar konsumsi sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan, dimana kredit tersebut mendapatkan porsi terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain pada setiap triwulan. Pada tw.II-2007, sektor perdagangan mendapatkan dana dari perbankan dalam bentuk kredit sebesar Rp.1,7 triliun atau 23,57% dari seluruh total kredit. Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan ini dapat mencerminkan bahwa sektor perdagangan adalah sektor yang lebih berkembang dibanding dengan sektor yang lain.

TABEL 3.8 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT BANK UMUM

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II
Total	6.118.262	6.258.180	6.666.355	6.713.064	7.228.680
- Lancar	4.957.027	4.978.457	5.658.971	5.658.159	6.179.304
- Dalam Perhatian Khusus	801.847	878.791	718.327	755.618	739.891
- Kurang Lancar	43.229	113.297	51.033	43.591	91.848
- Diragukan	40.739	30.406	28.018	38.974	46.772
- Macet	275.420	257.229	210.006	216.722	170.865
>> NPL (Nominal)	359.388	400.932	289.057	299.287	309.485
>> NPL (%)	5,87	6,41	4,34	4,46	4,28

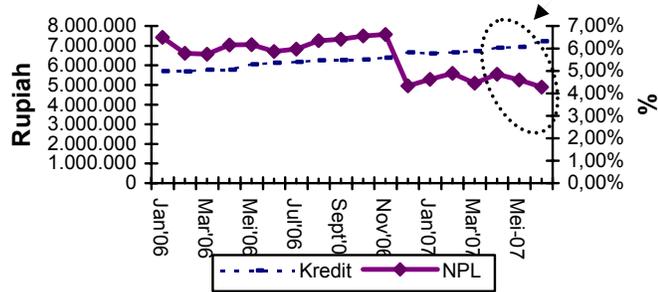
Sumber : Bank Indonesia

Adanya industri dan perusahaan-perusahaan asing yang melakukan produksi di Provinsi Kepulauan Riau menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, dimana mobilisasi tenaga kerja dari luar daerah tersebut menciptakan pangsa pasar baru di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, adanya pangsa pasar baru tersebut menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor yang paling berkembang di Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, sektor-sektor lain yang juga mendapatkan pembiayaan cukup besar dari perbankan adalah sektor jasa dunia usaha sebesar Rp.844 miliar (11,69%) dan sektor industri sebesar Rp.728 miliar (10,08%).

NPL bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2007 sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada tw.I-2007 NPL bank umum sebesar 4,46%, maka pada triwulan laporan NPL bank umum meningkat menjadi 4,28%. Secara nominal NPL bank umum sedikit meningkat yaitu sebesar Rp.309 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan NPL tersebut umumnya disebabkan oleh perubahan kualitas kredit pada kelompok Bank Swasta.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka perlu adanya penciptaan kerjasama dan koordinasi yang baik antara sektor perbankan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KBI Batam untuk mendorong kinerja dunia usaha adalah dengan memberikan Bantuan Teknis (Bantek) kepada dunia usaha khususnya UMKM yang berada di wilayah kerja KBI Batam. Di samping itu, KBI Batam juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan KKMB.

Grafik 3.4
Perkembangan NPL dan Kredit Bank Umum



3.4 Perkembangan Bank Syariah

Penerapan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yaitu suatu sistem dimana bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1992. Pada tahun yang sama berdiri pula bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Secara nasional, perkembangan industri perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang pesat dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah dalam waktu lima tahun secara rata-rata mencapai 60% per tahun.

Sampai dengan triwulan II 2007 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pada triwulan II-2007 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 23 UUS dan 107 BPRS.

TABEL 3.9 – INDIKATOR PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Keterangan	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw. I	Tw.II
Bank Umum Syariah	3	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	19	19	20	21	23
Jumlah Kantor	576	617	636	657	673
- BUS & UUS	480	512	531	552	566
- BPRS	96	105	105	105	107
Total Aset (Rp triliun)	22,70	24,31	26,72	28,45	29,21
Total DPK	16,43	17,98	20,67	21,88	22,71
Total Pembiayaan	18,16	19,66	20,44	20,82	22,97

Sumber : Bank Indonesia

3.4.1 Perkembangan Total Aset

Pada triwulan II-2007, industri perkembangan syariah di Indonesia masih memperlihatkan peningkatan laju pertumbuhan aset dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah secara triwulanan pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,67% dari triwulan sebelumnya atau mencapai 28,68% (yoy) dimana aset bank syariah mencapai Rp.29,21 triliun. Pertumbuhan volume usaha ini

didukung oleh penambahan sebanyak 16 kantor sehingga pada triwulan laporan jaringan kantor perbankan syariah telah mencapai 566 kantor yang dioperasikan oleh 3 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah.

TABEL 3.10 – INDIKATOR PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Keterangan	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw. I	Tw.II
Kantor Bank Umum Syariah	4	4	5	5	5
Total Aset (Rp. miliar)	140,16	163,84	190,33	212,60	261,08
Total DPK (Rp miliar)	89,71	99,01	136,24	148,49	176,25
Total Pembiayaan (Rp miliar)	174,08	198,41	225,34	249,73	326,64

Sumber : Bank Indonesia

Secara regional, perkembangan industri perbankan syariah di wilayah kerja KBI Batam pada tahun 2006 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana terdapat penambahan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 3 kantor sehingga pada akhir tahun 2006 jaringan perbankan syariah telah mencapai 5 Bank Umum Syariah. Pada triwulan II-2007 tidak terdapat perubahan pada jumlah bank umum syariah yang beroperasi di wilker KBI Batam, dan belum terdapat BPR yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Adapun jumlah aset yang dimiliki perbankan syariah di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 mencapai Rp.261,08 miliar atau meningkat 86,27% terhadap periode laporan tahun sebelumnya (yoy). Bila dibandingkan terhadap total aset industri perbankan secara keseluruhan di wilker KBI Batam, perbankan syariah memiliki pangsa mencapai 1,73%.

3.4.2 Perkembangan Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah di Indonesia sampai dengan triwulan II-2007 mencapai Rp.22,71 triliun atau secara triwulanan (qtq) tumbuh sebesar 3,79% dan 38,22% secara tahunan (yoy). Dilihat dari komposisi Dana Pihak Ketiga, simpanan dalam bentuk Deposito Mudharabah memiliki porsi terbesar yang mencapai 54,32% atau sebesar Rp.12,34 triliun, diikuti oleh Tabungan Mudharabah sebesar Rp.7,19 triliun atau 31,64% dan simpanan berbentuk Giro Wadiah yang mencapai Rp.3,19 triliun atau 14,03%.

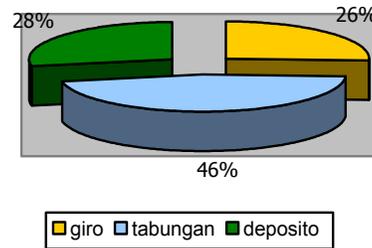
TABEL 3.11 – INDIKATOR PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Keterangan	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
Giro Wadiah					
Nilai (miliar rupiah)	2.658	2.748	3.416	3.615	3.188
Pangsa (%)	16,17	15,29	16,52	16,52	14,03
Tabungan Mudharabah					
Nilai (miliar rupiah)	4.972	5.605	6.430	6.740	7.188
Pangsa (%)	30,26	31,18	31,11	30,80	31,64
Deposito Mudharabah					
Nilai (miliar rupiah)	8.803	9.623	10.826	11.527	12.339
Pangsa (%)	53,57	53,53	52,37	52,68	54,32
Total	16.433	17.976	20.672	21.883	22.714

Sumber : Bank Indonesia

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga oleh industri perbankan syariah pada triwulan laporan mencapai Rp.176,25 miliar dengan pangsa sebesar 1,38% terhadap total DPK perbankan di wilayah kerja KBI Batam. Komposisi DPK terbesar terdapat pada simpanan jenis tabungan mudharabah yang mencapai Rp.81,34 miliar.

Grafik 3.5 Komposisi Dana Pihak Ketiga



Komposisi jenis simpanan yang diminati masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau cenderung pada jenis tabungan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan kondisi secara nasional dimana jenis deposito mudharabah memiliki porsi terbesar yaitu 54,32%.

Kondisi ini juga terjadi pada komposisi simpanan pada industri perbankan konvensional, dimana nasabah industri perbankan konvensional yang tersebar di wilayah kerja KBI Batam cenderung memilih simpanan berbentuk giro memiliki pangsa mencapai 43,79%.

3.4.3 Perkembangan Penyaluran Kredit

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan triwulan II-2007 mencapai Rp.22,97 triliun atau memiliki pangsa sebesar 1,54% dari total penyaluran kredit perbankan. Meskipun pangsa yang dimiliki perbankan syariah masih tergolong kecil, namun pertumbuhan indikator syariah secara tahunan (yoy) mencatat angka yang cukup baik yaitu mencapai 26,47%, lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit oleh bank umum yang tercatat sebesar 23,94%.

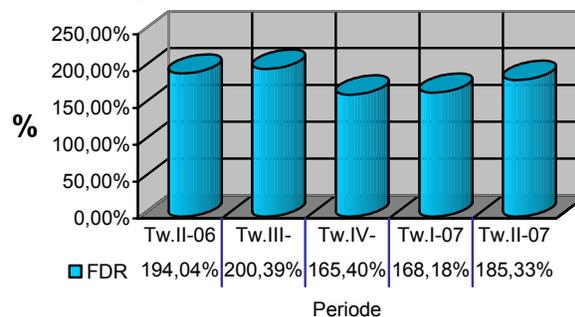
TABEL 3.12 – INDIKATOR PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Keterangan	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
Pembiayaan Musyarakah					
Nilai (miliar rupiah)	2.099	2.336	2.335	2.368	3.289
Pangsa (%)	11,56	11,88	11,42	11,37	14,32
Pembiayaan Mudharabah					
Nilai (miliar rupiah)	3.561	3.843	4.062	4.133	4.687
Pangsa (%)	19,61	19,54	19,87	19,85	20,41
Piutang Murabahah					
Nilai (miliar rupiah)	11.778	12.449	12.624	12.770	13.936
Pangsa (%)	64,85	63,31	61,75	61,33	60,67
Piutang Salam					
Nilai (miliar rupiah)	-	-	-	-	-
Pangsa (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Istishna ¹					
Nilai (miliar rupiah)	293	303	337	343	334
Pangsa (%)	1,62	1,54	1,65	1,65	1,45
Lainnya					
Nilai (miliar rupiah)	430	731	1.087	1.207	723
Pangsa (%)	2,37	3,72	5,32	5,80	3,15
TOTAL	18.162	19.662	20.445	20.820	22.969

Sektor ekonomi yang memperoleh pembiayaan terbesar oleh industri perbankan syariah di Indonesia pada triwulan II-2007 adalah sektor jasa dunia usaha sebesar Rp.6,84 triliun dengan pangsa sebesar 29,77% dan diikuti sektor perdagangan, restoran & hotel sebesar Rp.3,98 miliar dengan pangsa sebesar 17,41%. Adapun besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah pada triwulan laporan sebesar 103,31% menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan II-2007 yang tercatat sebesar 95,14%.

Pembiayaan oleh industri perbankan syariah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II-2007 mencapai Rp.277,54 miliar dengan pangsa 3,84% terhadap total pembiayaan oleh bank umum di wilker KBI Batam. Jumlah pembiayaan perbankan syariah tersebut membentuk nilai FDR sebesar 186,43% dimana terjadi peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 168,18%.

Grafik 3.6 Pergerakan tingkat FDR Perbankan Syariah di Prov. Kepulauan Riau



3.5 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Total *asset* BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.II-2007, total *asset* BPR mencapai Rp.498,78 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp.39,78 miliar (8,67%) dibanding tw.I-2007 yang tercatat sebesar Rp. 458,78 miliar.

TABEL 3.13 – PERKEMBANGAN KINERJA BPR

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw.I	Tw II
1. TOTAL ASSET	340.141	371.274	427.636	458.780	498.558
2. TOTAL DANA	293.085	314.030	356.977	371.215	410.714
a. Tabungan	20.018	23.803	28.168	29.471	30.792
b. Deposito	273.067	290.227	328.809	341.744	379.922

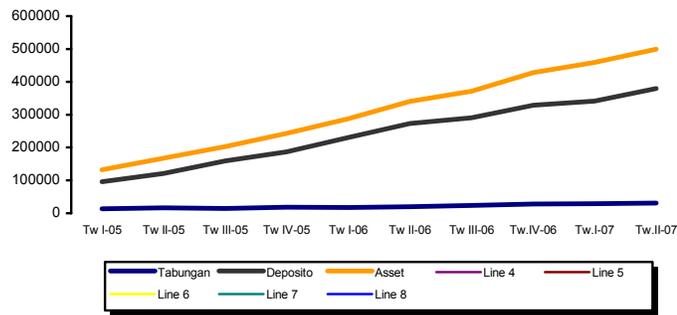
Sumber: Bank Indonesia

Total dana yang berhasil dihimpun oleh BPR pada triwulan laporan meningkat dengan triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan I-2007 sebesar Rp.371,22 miliar, maka pada triwulan II-2007 meningkat menjadi Rp.410,71 miliar, atau naik sebesar Rp.39,5 miliar (10,64%) dan secara tahunan (yoy) meningkat Rp.117,63 miliar (40,13%). Sebagian besar dana masyarakat

yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp.379,92 miliar atau 92,06% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 7,94% sisanya disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp.30,79 miliar. Hal ini merupakan kebalikan dari kondisi jenis simpanan masyarakat di Bank Umum. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito BPR yang tinggi menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat lebih suka menyimpan dananya dalam bentuk deposito di BPR dibandingkan Bank Umum.

Di samping itu, untuk kondisi di BPR, selisih suku bunga deposito dan suku bunga tabungan yang relatif cukup besar menyebabkan jumlah simpanan masyarakat dalam bentuk deposito daripada tabungan. Tabungan pada BPR lebih bersifat sebagai rekening penampungan pencairan kredit dan pembayaran angsuran kredit. Bunga deposito berjangka BPR rata-rata sebesar 6,5%, sementara suku bunga tabungan rata-rata 4%.

GRAFIK 3.7 – PERKEMBANGAN ASSET DAN DANA PIHAK KETIGA BPR



Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR kepada masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I-2007. Jumlah kredit yang diberikan pada tw.II-2007 sebesar Rp.306,57 miliar atau meningkat Rp.40,236 miliar (15,11%) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.266,33 miliar. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPR juga dibarengi dengan peningkatan NPL dimana jika pada triwulan I-2007 NPL BPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah 0,75% maka pada triwulan II-2007 meningkat menjadi 0,89%.

TABEL 3.14 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT BPR
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw.I	Tw II
Total Kredit	165.561	196.539	231.998	266.329	306.565
a. Lancar	163.620	193.584	229.390	264.319	303.841
b. Kurang Lancar	1.157	1.977	1.600	1.024	1.551
c. Di ragukan	385	624	765	771	877
d. Macet	399	354	243	215	296

Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit untuk konsumsi yang disalurkan BPR di wilayah kerja KBI Batam

pada tw.II-2007 sebesar Rp.213,74 miliar atau 69,72% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sementara kredit untuk modal kerja yang diberikan BPR di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.72,51 miliar atau 23,65% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sedangkan untuk kredit investasi sebesar Rp.20,32 miliar (6,63%). Besarnya kredit BPR untuk keperluan konsumsi mencerminkan intermediasi yang dilakukan BPR terhadap dunia usaha masih belum optimal. Seperti halnya bank umum, BPR masih lebih merasa aman memberikan kredit di sektor konsumsi.

TABEL 3.15 – PERKEMBANGAN KREDIT BPR MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw.I	Tw II
Total Kredit	165.561	196.539	231.998	266.329	306.565
a. Investasi	20.073	20.541	20.059	20.355	20.320
b. Modal Kerja	50.126	56.473	62.076	66.135	72.505
c. Konsumsi	95.362	119.524	149.863	179.839	213.740

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data pada tabel 3.15, penyaluran kredit untuk modal kerja (9,63%) dan konsumsi (18,85%) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit untuk investasi mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kredit untuk KPR ini menunjukkan adanya pergeseran pembiayaan yang dilakukan oleh BPR, dimana banyaknya proyek dan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menyebabkan permintaan kredit untuk KPR meningkat.

Pada tw.II-2007, kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar kepentingan konsumsi masih didominasi kredit untuk sektor perdagangan yaitu sebesar Rp.41,17 miliar atau 44,35% dari total kredit untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Kemudian kredit untuk sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp.27,46 miliar atau 29,58% dari seluruh kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Sedangkan sektor pertanian dan perindustrian masing-masing sejumlah Rp.720 juta (0,78%) dan Rp.296 juta (0,32%). Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan menunjukkan industri ini masih merupakan sektor yang cukup berkembang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan Tanjung Pinang.

TABEL 3.16 – PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI YANG MEMPEROLEH PEMBIAYAAN DARI BPR

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
SEKTOR EKONOMI	165.561	196.515	231.998	266.329	306.565
a. Pertanian	252	410	298	852	720
b. Perindustrian	584	938	712	393	296
c. Perdagangan	35.577	32.739	36.796	40.347	41.167
d. Jasa-Jasa	14.823	21.885	27.156	24.577	27.461
e. Lainnya	114.325	140.544	167.036	200.160	236.921

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 3.16, kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi secara rata-rata mengalami peningkatan. Sektor pertanian yang triwulan sebelumnya mengalami peningkatan tertinggi, pada triwulan II-2007 justru mengalami penurunan sebesar 15,49%. Peningkatan paling tinggi pada tw.II-2007 dialami oleh kredit untuk sektor ekonomi lainnya yang meningkat 18,37% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit juga terjadi di sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan sebesar 11,73% dan 2,03% dari triwulan sebelumnya.

3.5.1 Perkembangan Kredit UMKM

Upaya aktif Bank Indonesia untuk mendorong upaya pengembangan UMKM antara lain melalui pembentukan satgas KKMB. Selain itu, dalam upaya pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia Batam menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti Bantuan Teknis UMKM dan Rapat Koordinasi UMKM. Di samping itu, Bank Indonesia Batam juga turut serta dalam upaya untuk mendukung kegiatan Bazaar Intermediasi UMKM.

Secara nasional, Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, diantaranya adalah pendirian lembaga riset perbankan daerah (LRPD) dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan KKMB di bidang kelautan dan perikanan antara BI dengan Departemen Kelautan & Perikanan.

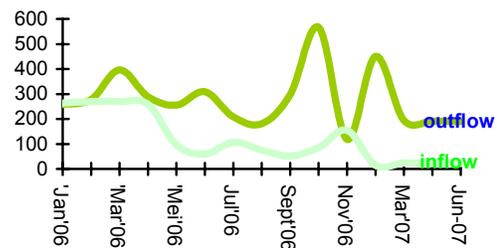
Untuk wilayah kerja KBI Batam, dilihat dari sisi pendanaan, penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2007 tercatat sebesar Rp.4,09 triliun atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.3,45 triliun.

3.6 Perkembangan Sistem Pembayaran

3.6.1 Pengedaran Uang Kartal

Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada tw.II-2007, *outflow* mencapai Rp.188,67 miliar, sementara *inflow* mencapai Rp.20,56 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp.167,11 miliar. Secara bulanan rata-rata *outflow* Rp.190,01 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp.21,64 miliar.

Grafik 3.8 Perkembangan Inflow/Outflow di KBI Batam (Rp. miliar)



Sumber : Bank Indonesia

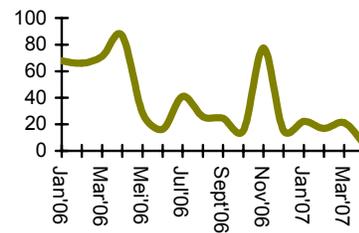
Pada triwulan laporan tercatat jumlah uang kertas yang keluar dari KBI Batam sebanyak Rp.188,40 miliar dan uang logam sebanyak Rp.271,86 juta, sedangkan uang dalam bentuk uncut sebesar Rp.80 juta rupiah.

3.6.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) yaitu Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang rupiah dalam kondisi yang layak kepada masyarakat. Kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak edar. Di samping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Pada tw.II-2007, jumlah PTTB pada uang yang tidak layak edar sebesar Rp.5,29 miliar, menurun sebesar 74,88% terhadap triwulan sebelumnya. Penurunan PTTB ini sejalan dengan penurunan jumlah *inflow* ke BI Batam. Hal ini diperkirakan karena pada awal tahun, kegiatan ekonomi para pelaku usaha masih belum terlalu aktif.

Grafik 3.9 Perkembangan PTTB (Rp miliar)



Sumber: Bank Indonesia

3.7 Lalu Lintas Pembayaran Giral

3.7.1 Kliring Lokal

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.IV-2006 mencapai Rp.2,58 miliar atau rata-rata mencapai Rp.646,15 miliar/bulan. Nilai total kliring tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya baik total warkat kliring maupun secara nominal, begitu pula secara rata-rata.

TABEL 3.17 – PERKEMBANGAN KLIRING LOKAL

(miliar rupiah)

Keterangan	2006			2007	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
Perputaran Kliring					
- Lembar	154.662	134.863	103.808	104.613	108.413
- Nominal (miliar Rp)	2.734.433	2.584.609	2.437.397	2.297.292	2.267.885
Rata-rata Harian Perputaran Kliring					
- Lembar	2.535	2.247	1.759	1.687	1.109
- Nominal (miliar Rp)	44.827	43.077	41.312	37.053	22.355
Penolakan Cek/BG Kosong					
- Lembar	1.012	856	1.623	1.449	1.395
- Nominal (miliar Rp)	19.924	14.506	33.611	33.885	120.547

Sumber : Bank Indonesia

Volume transaksi kliring di wilker BI Batam pada tw.II-2007 rata-rata mencapai 1.109 per-hari, menurun 34,28% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1.687 warkat. Sementara untuk nominal transaksi kliring, pada triwulan II-2007 terdapat penurunan sebesar Rp.29.407 miliar 1,28% dibandingkan triwulan sebelumnya dari Rp.2,30 triliun menjadi Rp.2,27 triliun.

Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan kliring, maka Bank Indonesia menargetkan pengimplementasian Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2007. Hal ini dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai yang cepat, aman, handal, dan efisien. Aplikasi SKNBI pertama kali diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005, dimana sampai akhir tahun 2005 seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah diimplementasikan SKNBI.

3.7.2 Transaksi BI-RTGS

Transaksi masyarakat melalui sarana Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam pada tw.II-2007 mengalami peningkatan baik pada transaksi masuk maupun transaksi keluar jika dibandingkan triwulan sebelumnya baik nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi RTGS untuk transaksi masuk sebesar Rp.3,38 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.090 transaksi, sementara untuk transaksi keluar sebesar Rp.4,09 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.668 transaksi.

TABEL 3.18 – PERKEMBANGAN BI-RTGS

Keterangan	2006			2007		q-t-q	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Nominal	%
Transaksi Masuk							
Nominal (miliar Rp)	4.025	4.246	5.202	3.724	4.090	366	9,83
Volume	6.053	6.135	6.427	6.865	6.668	(197)	-2,87
Transaksi Keluar							
Nominal (miliar Rp)	5.515	4.187	4.056	3.183	3.376	193	6,06
Volume	7.385	6.866	5.995	5.753	6.090	337	5,86

Sumber : Bank Indonesia

Penerapan sistem BI-RTGS di Indonesia dimulai sejak tanggal 17 November 2000, dimana sistem BI-RTGS dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (*High Value Payment System – HPVS*) yang memiliki potensi terjadinya resiko sistemik sebelum adanya sistem BI-RTGS menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran. Adapun implementasi sistem BI-RTGS di KBI Batam mulai dilaksanakan sejak 23 November 2001 bersamaan dengan KBI Pekanbaru.

3.7.3 Uang Palsu

Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia Batam pada tw.II-2007 berjumlah Rp.280.000,00 dan mencapai 7 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan nominal sebesar Rp.140.000,00 dengan jumlah lembar meningkat sebanyak 3 lembar.

Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 dilaporkan sebanyak 1 lembar, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 dilaporkan sebanyak 2 lembar dan uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.20.000,00 dilaporkan sebanyak 4 lembar.

Terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peredarannya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kalangan (perbankan, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum).

Bab 4

Keuangan Daerah Periode Tahun 2007

4.1 KONDISI UMUM

Salah satu faktor pendukung utama bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah adalah jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah, demikian pula dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 terdapat peningkatan target penerimaan sebesar 22,42% yang disebabkan peningkatan target penerimaan pada beberapa pos, antara lain: pos pendapatan asli daerah, dan pos dana perimbangan. Sementara itu untuk pos bagi hasil pajak/bukan pajak terjadi penurunan target penerimaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.2 – REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU*(dalam juta rupiah)*

No	Jenis Penerimaan	2006			2007	
		Tw.I	Sem. I	Sem. II	Jan	Feb
I	PEMBIAYAAN	91.770,24	92.218,77	234.960,64	214.017,80	214.226,27
II	PENDAPATAN					
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.808,15	42.671,06	235.536,00	9.270,95	17.014,23
1	Pajak Daerah	12.827,94	28.163,18	229.116,00	6.611,40	11.827,78
2	Retribusi Daerah	4.639,40	9.887,18	420,00	1.423,75	2.955,77
3	Lain-lain PAD yang sah	1.340,81	4.620,71	0,00	1.235,80	2.230,69
4	Laba Perusahaan yang Sah	-	-	6.000,00	-	-
B	DANA PERIMBANGAN	45.719,23	161.401,89	400.075,00	19.683,57	41.417,66
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	6.100,06	25.486,99	222.075,00	1.408,57	4.867,66
2	Dana Alokasi Umum	2.028,55	61.023,52	178.000,00	18.275,00	36.550,00
3	Dana Alokasi Khusus	37.300,75	74.601,50	0,00	0,00	0,00
4	Bagi Hasil Pajak Provinsi	289,87	289,87	0,00	0,00	0,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	156.297,62	296.291,72	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun berdasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Untuk tahun 2007, KUA Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan,
3. Pembangunan infrastruktur perekonomian, pemerataan pertumbuhan antar daerah dan pengentasan kemiskinan,
4. Penguatan wilayah perbatasan,
5. Pengembangan keagamaan, kesenian dan pelestarian Budaya Melayu,
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan peningkatan pengawasan.

Adapun komponen pendanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 terdiri dari:

Pendapatan Daerah	Rp.1.115.393.669.534
Pembiayaan SILPA	Rp. 444.606.330.466
Jumlah APBD	Rp.1.560.000.000.000

4.2 APBD KOTA BATAM

Target APBD Kota Batam untuk sub pendapatan tahun 2007 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp.746,04 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.135 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2007 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2006 pos pendapatan Kota Batam sebesar Rp.529,23 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.93,83 miliar.

Berdasarkan rincian APBD Kota Batam untuk tahun 2007, program kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan memiliki persentase terbesar terhadap total APBD keseluruhan yang mencapai Rp.196,87 juta sedangkan persentase terkecil terdapat pada Biro Pemberdayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp.1,36 juta.

TABEL 4.3 – ALOKASI DANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI BATAM TAHUN 2007

NO.	KEBIJAKAN UMUM	TOTAL DANA (Juta Rupiah)
I.	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERTAMBANGAN a. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan, jembatan/pelantar, pelabuhan. b. Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan, pelantar dan jembatan. c. Meningkatkan utilitas perkotaan dan mewujudkan citra kota yang nyaman. d. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas infrastruktur di daerah hinterland.	Rp. 196,870 Rp. 70,100 Rp. 68,526 Rp. 26,750 Rp. 31,494
II.	DINAS PERHUBUNGAN a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi.	Rp. 19,420 Rp. 19,420
III.	DINAS KESEHATAN a. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan & KB bagi masy.	Rp. 27,126 Rp. 27,126
IV.	DINAS PERINDAG DAN KOPERASI a. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi. b. Pembinaan industri kecil dan menengah. c. Pembinaan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan.	Rp. 10,607 Rp. 7,657 Rp. 2,500 Rp. 450
V.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. c. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.	Rp. 9,775 Rp. 4,225 Rp. 4,950 Rp. 600
VI.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA a. Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar. b. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.	Rp. 55,176 Rp. 38,586 Rp. 16,590
VII.	DINAS PARIWISATA a. Peningkatan kebudayaan dan kepariwisataan. b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.	Rp. 8,250 Rp. 7,900 Rp. 350
VIII.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Pengembangan pertanian dan perikanan.	Rp. 5,500 Rp. 5,500
IX.	DINAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN a. Pengelolaan kebersihan kota.	Rp. 9,739 Rp. 9,739
X.	BADAN PEMBERDAYAAN MASY DESA & KESEJAHTERAAN SOSIAL a. pemberdayaan UMKM dan koperasi. b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.	Rp. 14,570 Rp. 9,950 Rp. 4,620
XI.	BIRO PEMBERDAYAAN a. pemberdayaan perempuan dan anak.	Rp. 1,360 Rp. 1,360
XII.	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN a. Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar.	Rp. 5,500 Rp. 5,500
XIII.	BIRO PEMERINTAHAN SETDA a. Menyelenggarakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.	Rp. 2,970 Rp. 2,970

4.3 APBD KOTA TANJUNG PINANG

Jumlah alokasi APBD Kota Tanjung Pinang pada tahun 2007 mencapai Rp.150,26 juta dimana alokasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Rp.51,79 juta. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 76.547 orang, terdapat 7,8% penduduk yang merupakan pengangguran dengan nilai IPM mencapai 72,7 dan menduduki posisi 79 dari Kab/Kota.

TABEL 4.4 – KEGIATAN PEMPROV KEPRI 2007 BERLOKASI DI KOTA TANJUNG PINANG

NO	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp)
1	DISDIKPORA	51.789.704.965
2	Dinas Kesehatan	13.404.510.680
3	Dinas Pekerjaan Umum	38.680.025.908
4	Dinas Perhubungan	37.888.534.350
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	217.612.500
6	BPMD dan Kesejahteraan Sosial	1.594.132.517
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.361.680.367
8	Dinas Pariwisata	3.327.725.000

4.4 APBD KABUPATEN KARIMUN

Jumlah APBD Kabupaten Karimun tahun 2007 mencapai Rp.535 miliar atau meningkat 30,49% terhadap tahun 2006. Daerah Karimun memiliki potensi besar untuk dikembangkan diantaranya sektor pariwisata, sektor perikanan dan kelautan, potensi pertanian, potensi perdagangan, serta potensi pertambangan.

TABEL 4.5 – KEGIATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2007

NO	DINAS/BADAN	JUMLAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Dinas Pekerjaan Umum	7	40	Rp. 189.653.104.180,-
2	Dinas Pendidikan	1	24	Rp. 20.797.400.000,-
3	Dinas Perhubungan	1	4	Rp. 18.704.000.000,-
4	Dinas Kesehatan	3	9	Rp. 3.041.500.000,-
5	Dinas Perikanan	1	14	Rp. 12.400.000.000,-
6	Dinas Pertanian	1	10	Rp. 12.379.000.000,-
7	Dinas Pariwisata	2	5	Rp. 7.727.607.550,-
8	Dinas Tenaga Kerja	1	7	Rp. 4.216.738.000,-
9	Dinas Pertambangan	1	7	Rp. 8.141.332.640,-
10	Badan Pemberdayaan Masy Desa	1	4	Rp. 7.936.504.000,-
11	Dinas Perindustrian & Perdag.	1	15	Rp. 2.210.000.000,-
	Jumlah	20	139	Rp. 287.207.186.380,-

4.5 APBD KABUPATEN BINTAN

Nilai APBD Kabupaten Bintan pada tahun 2007 sebesar Rp.439 miliar atau menurun - 6,71% terhadap tahun 2006, sedangkan proyeksi APBD tahun 2008 adalah Rp.404 miliar dengan proyeksi realisasi PAD mencapai Rp.88,6 miliar pada tahun 2008.

Besarnya alokasi pembiayaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2007 mencapai Rp.48,15 miliar yang terdiri dari:

a. Pembangunan Kantor Bupati Tahap I	Rp.19.500.000.000,-
b. Pembangunan Kantor DPRD Tahap I	Rp.19.500.000.000,-
c. Pembangunan Kantor Dinas PU (DAK)	Rp. 5.959.000.000,-
d. Pendamping Pembangunan Kantor Dinas PU	Rp. 595.500.000,-
e. <u>Pembangunan Jalan Pusat Pemerintahan</u>	<u>Rp. 2.593.176.660,-</u>
Total	Rp.48.147.676.660,-

TABEL 4.6 – PERKEMBANGAN APBD DAN REALISASI PAD KABUPATEN BINTAN
(miliar rupiah)

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Realisasi PAD	54	59	65,5	87,7	88,6
2	APBD	355	276	470,6	439	404

4.6 APBD KABUPATEN LINGGA

Pembentukan Kabupaten Lingga adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor:31 tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah Kabupaten Lingga yang mencapai 211.772 km² terdiri dari 377 buah pulau, dimana 92 buah pulau yang sudah berpenghuni dan sisanya merupakan pulau yang belum berpenghuni. Jumlah penduduk Kabupaten Lingga adalah 84.254 jiwa dan memiliki PDRB sebesar Rp.257,69 miliar. Pendapatan perkapita penduduk di wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur mencapai Rp.7,4 juta/jiwa.

Untuk mengembangkan daerah tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi telah menyusun beberapa program prioritas kegiatan Kabupaten Lingga yang terdapat pada APBD Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai Rp.309,81 miliar dan terdiri dari:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran | Rp.105.000.000.000,- |
| b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat | |
| - pendidikan | Rp. 25.108.206.250,- |
| - kesehatan | Rp. 7.485.000.000,- |
| c. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur | Rp.139.292.000.000,- |
| d. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat | Rp. 18.965.358.200,- |
| e. Peningkatan dan pembangunan sosial dan budaya | Rp. 10.472.817.550,- |
| f. Memperkecil kesenjangan pembangunan kecamatan | Rp. 2.489.659.000,- |

4.7 APBD KABUPATEN NATUNA

Wilayah Kabupaten Natuna memiliki luas mencapai 264.788,51 km² dengan jumlah penduduk mencapai 93.644 jiwa. Daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 28,95 jiwa/km² memiliki visi Menuju Natuna Makmur, Adil, Sejahtera Tahun 2020. Kabupaten Natuna memiliki lima pilar utama dalam membangun daerahnya, yaitu: Iman dan taqwa, kesehatan, pendidikan, ekonomi, penegakan dan taat hukum.

4.8 PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA BATAM

Pada tw.I-2006 (Januari-Maret), realisasi penerimaan pajak neto dalam bentuk PPh, PPN, dan PPn-BM serta pajak lainnya berjumlah Rp.210,75 miliar, sedangkan pada tw.II-2006 realisasi penerimaan sebesar Rp.180,79 miliar. Dengan demikian selama periode Januari-Juni 2006, realisasi penerimaan pajak neto telah mencapai Rp.391,54 miliar, lebih rendah dibandingkan periode Semester I-2005 yang tercatat sebesar Rp.600,10 miliar atau turun sebesar 34,75%.

Apabila dilihat dari struktur penerimaan pajak menurut jenisnya selama periode Semester I-2006, sebesar 90,96% dalam bentuk PPh meskipun menunjukkan peningkatan andil jenis pajak ini dibanding pada periode Semester I-2005 yang mencapai 86,59%. Penerimaan pajak dalam bentuk PPN dan PPn-BM kontribusinya juga menurun dari 11,98% (Semester I-2005) menjadi

8,59% (Semester I-2006). Dengan demikian, perlu terus ditindaklanjuti langkah-langkah positif yang telah diterapkan dalam upaya mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di Kota Batam, dengan lebih mengedepankan transparansi dari objek pajak maupun aparat perpajakan.

TABEL 4.8 – REALISASI PENERIMAAN PAJAK NETO MELALUI KPP BATAM
(Miliar Rp)

Periode	2005 *)				2006 *)			
	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml
I. Triwulan I	264,91	38,13	4,08	307,12	199,24	11,00	0,51	210,75
a. Januari	63,14	14,00	1,14	78,28	49,80	5,47	0,10	55,37
b. Februari	54,65	11,58	,52	67,75	53,72	5,76	0,11	59,60
c. Maret	147,12	12,55	1,42	161,09	95,72	-0,24	0,30	95,78
II. Triwulan II	254,71	33,78	4,49	292,98	156,91	22,64	1,24	180,79
d. April	74,55	11,73	1,45	87,73	53,38	6,86	0,69	60,93
e. Mei	67,69	11,90	1,50	81,09	54,80	7,89	0,41	63,10
f. Juni	112,47	10,15	1,54	124,16	48,73	7,89	0,14	56,76
Semester I	519,62	71,91	8,57	600,10	356,15	33,64	1,75	391,54

Sumber : KPP Batam

Ket : *) Angka Perbaikan

Bab 5 Prospek Perekonomian Daerah

5.1 PROSPEK EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian regional di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 s/d 2007 terus mengalami pertumbuhan dengan persentase pertumbuhan yang cukup stabil dengan persentase pertumbuhan perekonomian daerah mencapai 5,13% dimana sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar. Di samping itu, kestabilan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup stabil yang tercermin pada laju inflasi regional yang lebih kecil dibandingkan laju inflasi nasional dan Pekanbaru. Demikian pula dengan perkembangan indikator perbankan meskipun secara triwulanan persentase pertumbuhannya tidak terlalu signifikan.

Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang strategis dan berada di jalur perdagangan internasional mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi di wilayah ini, diantaranya sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Potensi yang dimiliki oleh “Kota Gurindam” ini menjadi salah satu asset nasional yang mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan perekonomian Indonesia, apabila pemerintah mampu menciptakan kebijakan dan kondisi yang kondusif bagi Kepulauan Riau untuk berkembang. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang dan selalu berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha khususnya pada sektor industri, dimana pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti: *Free Trade Zone (FTZ)*, *Bonded Zone Plus (BZP)*, dan *Special Economic Zone (SEZ)*. Saat ini pemerintah telah menetapkan Free Trade Zone untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun melalui PP No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, PP No. 47 Tahun 2007 tentang KPBPB Bintan, dan PP No. 48 Tahun 2007 tentang KPBPB Karimun.

Terbitnya payung hukum tersebut merupakan satu hal yang diharapkan oleh seluruh pihak terutama pelaku usaha dan instansi di Kepulauan Riau. Langkah lain yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah untuk memajukan perekonomian daerahnya serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan promosi, sosialisasi dan kunjungan dari pihak investor dalam negeri maupun luar negeri. Di samping

itu, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu prioritas utama program kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan perkembangan sektor ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan II-2007, sektor industri masih menjadi sektor utama yang memberikan distribusi terbesar pada pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, dan diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor perdagangan. Dari sisi penggunaan sektor PMTB dan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk triwulan mendatang, diperkirakan pertumbuhan perekonomian wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkat dengan prasyarat sebagaimana diuraikan diatas. Di samping itu, kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta kemudahan birokrasi yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal dasar pengembangan kemajuan daerah.

5.2 PROSPEK INFLASI

Melihat perkembangan pergerakan harga barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kota Batam tercermin bahwa sampai dengan triwulan II-2007 laju inflasi/deflasi di Kota Batam cukup stabil. Peningkatan harga barang dan jasa dalam jangka waktu 2004 s/d 2007 secara rata-rata mencapai 1,2% per-triwulan dan berada di bawah laju inflasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perubahan harga yang terjadi dapat terkendali dengan baik.

Kelompok bahan makanan merupakan kelompok barang yang memiliki pergerakan harga yang cukup berfluktuasi. Hal ini karena keterbatasan sektor pertanian Kota Batam sehingga Kota Batam sangat tergantung pada pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi masyarakat.

Untuk triwulan kedepan diperkirakan tekanan harga terhadap barang dan jasa di Kota Batam masih tetap terjaga dengan prasyarat kondisi ekonomi dan sektor riil tetap stabil. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat *administered price* diharapkan tidak terjadi dalam triwulan kedepan. Kepastian hukum dan iklim berinvestasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi salah satu kondisi yang memerlukan pembenahan dari Pemerintah dan pihak terkait di samping ketersediaan infrastruktur yang akan mendukung perkembangan sektor ekonomi.

5.3 PROSPEK PERBANKAN

Sejalan dengan prospek perekonomian daerah yang meningkat, peran sektor keuangan khususnya perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III-2007 diperkirakan juga akan mengalami peningkatan pada indikator-indikator perbankan, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Hal ini dipengaruhi oleh prospek penurunan suku bunga yang didukung oleh pendapatan masyarakat yang meningkat. Kebijakan relaksasi perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia juga diharapkan mampu mendukung peningka di samping peran dan fungsi perbankan kedepannya.

Kondisi perbankan di wilayah kerja KBI Batam menunjukkan bahwa secara rata-rata perbankan merupakan *funding unit* dimana pertumbuhan penghimpunan dana yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi cukup besar bagi perbankan terhadap sisi pembiayaan, dimana dana masyarakat yang terhimpun tersebut akan menjadi modal perbankan untuk penyaluran kredit. Meskipun demikian, pihak perbankan mesti tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dengan meningkatnya kegiatan dunia usaha serta rencana pemerintah untuk membangun beberapa proyek infrastruktur di wilayah Kepri diperkirakan juga akan

mendorong peningkatan fungsi intermediasi dan transaksi ekonomi dengan menggunakan pelayanan jasa pada sistem perbankan. Kedepannya diharapkan dapat tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antara sektor perbankan dengan sektor riil.

BOKS - I

Survey Indeks Harga Properti Residensial di Kota Batam Tw.II – 2007

Survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) merupakan survei rutin triwulanan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga properti residensial, baik pada triwulan bersangkutan maupun perkiraan triwulan berikutnya. Survei dilakukan terhadap pengembang di wilayah Jabotabek dan 13 Kantor Bank Indonesia, dimana jumlah responden mencakup 40 pengembang utama di Jabotabek dan sekitar 215 pengembang di KBI. Hasil survey ini diolah menjadi Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) gabungan/komposit. Survey Harga Properti Residensial dilakukan sejak triwulan I-1999 untuk Jabotabek dan 12 KBI, dan Pontianak sejak triwulan I-2004. Sementara itu, KBI Batam melakukan survei IHPR sejak tw.I-2005.

Ruang lingkup Survey Indeks Harga Properti Residensial (SIHPR) meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (*primary market*) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survey digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang. Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga aset.

Lokasi responden untuk SHPR berdasarkan pada Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Otorita Batam yang meliputi : Batam Centre, Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil dan Duriangkang dimana jumlah sampel sebanyak 54 proyek dari 24 perusahaan/developer. Sementara itu, harga rata-rata properti residensial berdasarkan klasifikasi rumah pada tw.I-2007 adalah:

NO	Klasifikasi Rumah	Harga Rata-Rata Rumah	
		Tw.I-2007	Tw.II-2007
1.	Kecil	Rp. 72.350.173,61	Rp. 73.022.716,67
2.	Sedang	Rp. 193.102.320,95	Rp. 185.253.335,51
3.	Besar	Rp. 647.992.745,45	Rp. 645.435.031,25
	Total	Rp. 258.441.316,63	Rp. 250.355.031,25

Sumber : Laporan SHPR – Data Diolah, 2007

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa tipe rumah yang dijual oleh pengembang masih didominasi oleh kelas sedang (41,43%), kelas kecil (35,71%), dan kelas besar (22,86%), sedangkan untuk rata-rata harga rumah berdasarkan klasifikasinya terlihat bahwa terdapat penurunan harga rata-rata terhadap tw.I-2007 pada rumah besar (turun dari Rp.647.992.745,45 menjadi Rp.645.435.031,25), rumah sedang (turun dari Rp.193.102.320,95 menjadi Rp.185.253.335,51) namun pada rumah kecil mengalami peningkatan yaitu dari Rp.72.350.173,61 menjadi Rp.73.022.716,97. Hasil survei IHPR Kota Batam tw.II-2007 diketahui bahwa indeks triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 3,13%

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan properti di Batam, antara lain: penyediaan air bersih terkait dengan aturan yang diterapkan ATB bagi developer yang mengajukan sambungan baru, masalah harga bahan bangunan, pembatasan izin kepemilikan rumah bagi WNA di Batam. Sedangkan permasalahan yang paling sedikit mempengaruhi produktivitas adalah keluhan pelanggan tentang kejelasan PPN, spekulasi tanah di Batam dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Terkait dengan perkembangan sektor properti di Kota Batam, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain REI, developer serta perbankan, terutama mengingat kecenderungan developer di Kota Batam umumnya belum memanfaatkan peran perbankan dalam pembiayaan usahanya.

BOKS - II

Menyambut Free Trade Zone (FTZ) Batam

Setelah penantian panjang, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 yang mengatur penerapan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam Senin (20/8). PP tersebut dikeluarkan secara bersamaan dengan PP yang mengatur tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Bintan dan Karimun.

FTZ sejatinya merupakan kebijaksanaan pengembangan industri melalui berbagai kemudahan fiskal. Melalui kebijaksanaan makro-spasial dengan memberikan berbagai fasilitas di bidang ekonomi di tingkat lokal ini diharapkan faktor-faktor keunggulan komparatif daerah dapat dioptimalkan sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan UMKM

Dengan adanya penerapan FTZ pertumbuhan ekonomi Kota Batam diprediksi akan mencapai angka dua digit. Hal tersebut seakan membuat kita bernostalgia pada cerita sukses Batam (1994-1997). Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Batam tumbuh antara 16,59 (1994) sampai dengan 14,76 (1997).

Indikasi menuju pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut setidaknya dapat dilihat dari investasi yang masuk ke Kota Batam. Menjelang penetapan FTZ, tepatnya tanggal 2 Agustus lalu, terjadi penandatanganan kesepakatan investasi oleh 20 perusahaan yang disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terdapat enam proyek yang akan dikerjakan oleh investor dengan nilai US\$668,3 juta. Bidang usaha yang digarap oleh para investor juga beragam, mulai dari logistik, industri pipa besi, industri pendukung migas, peralatan listrik, manufaktur elektronik, galangan kapal, hingga kawasan wisata.

Kebijakan baru ini juga diharapkan dapat meminimalisir angka pengangguran yang sampai dengan tahun 2006 tercatat 35.768 jiwa. Penyerapan tenaga kerja yang pada tahun 2006 tercatat sebesar 515.585 pekerja diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi dengan adanya aliran investasi yang akan membuka lapangan kerja baru di Kota Batam.

Meskipun investasi yang masuk ke Kota Batam sebagian besar berbasis ekspor dan memproses barang modal impor namun dalam skala tertentu tetap membutuhkan dukungan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Batam pada tahun 2005 UKM di Batam tercatat sejumlah 10,020 buah atau hanya bertambah 210 buah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adanya penerapan FTZ di Batam diharapkan dapat membuka peluang dan potensi untuk mendorong perkembangan UKM di Kota Batam. Barang-barang modal maupun konsumsi yang mendukung industri dapat disuplai oleh UMKM seperti penyediaan *catering*, pengadaan *stationary*, jasa reparasi, perawatan dan pergantian alat-alat produksi, pakaian serta kebutuhan lainnya.

Ledakan Penduduk dan Penyelundupan

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penerapan FTZ di Batam. Salah satunya adalah kenaikan jumlah penduduk, khususnya tenaga kerja pendatang dari luar Kota Batam. Sampai dengan Desember 2006 jumlah penduduk Kota Batam tercatat sebesar 713.960 ribu jiwa. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan adanya penerapan FTZ diprediksi akan diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk yang selama ini antara 6-7 % per tahun bisa menyentuh angka 11 % s/d 12,5 % per tahun mulai tahun 2008 mendatang.

Kenaikan jumlah penduduk yang tinggi tersebut akan menimbulkan persoalan demografis dan sosial antara lain penyediaan infrastruktur sosial dan sarana publik seperti perumahan, sekolah, sarana kesehatan, dan ketersediaan transportasi. Untuk itu Pemerintah Kota Batam harus mengantisipasi dengan menyediakan sarana publik dengan jumlah yang

WACANA PEMBUBARAN OTORITA BATAM

Menyusul ditandatanganinya PP FTZ BBK oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 20 Agustus 2007, keberadaan Otorita Batam (OB) akan dibubarkan. Sesuai dengan PP tersebut, maka akan dibentuk Dewan Kawasan Zona Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (DK FTZ BBK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK). Terkait dengan hal tersebut terhitung tanggal 31 Desember 2008, Badan Otorita Batam harus segera mengosongkan semua aset dan kewenangan yang dimiliki kepada BPK.

Sedangkan tugas DK adalah untuk merumuskan anggaran pembangunan infrastruktur untuk merangsang penanaman modal di BBK. Sedangkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut sebagian dari APBD dan sebagian besar dari APBN.

Komposisi keanggotaan Dewan Kawasan sendiri, menurut dia, akan mengakomodasi semua pihak terkait dalam percepatan pengembangan investasi di daerah yakni dari kelompok pengusaha, birokrat pemegang kebijakan, dan aparat keamanan.

Selain DK PP FTZ BBK juga mengamankan pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) untuk percepatan pertumbuhan investasi di BBK. Pembentukan BPK ini dilakukan oleh DK. Keberadaan BPK ini hampir mirip dengan keberadaan OB, hanya saja OB memiliki fungsi pembangunan infrastruktur, sementara BPK untuk percepatan pertumbuhan investasi.

Berdasarkan perpu tersebut, FTZ sebagai wilayah hukum di luar daerah pabean dikelola dewan kawasan dan badan perusahaan. Dewan kawasan menentukan strategi dan kebijakan, sementara badan perusahaan merupakan pelaksana pengelolaan. Anggota dewan kawasan diusulkan Gubernur dan DPRD dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Hal yang menjadi perhatian terkait dengan pembubaran OB masalah masa depan pegawai OB. Tidak semua pegawai OB akan langsung duduk di Badan Pengelolaan Kawasan. Sebab, personel yang akan duduk di badan pengelolaan akan ditentukan DK. Para pegawai tersebut adalah pegawai sejumlah departemen, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, BPPT dan sebagainya. Apabila OB dibubarkan maka mereka bisa kembali ke departemennya atau disebarkan di Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kota dan kabupaten di Kepri.

Rencana pembubaran Otorita Batam dan pengalihan seluruh asetnya ke dalam Badan Pengusahaan Kawasan diyakini oleh sejumlah pihak tidak akan mengganggu investasi dan upaya mendatangkan investor baru ke Batam. Karena tugas dan wewenang yang selama ini diemban OB otomatis akan jadi tanggungan Badan Pengusahaan Kawasan.

proporsional. Selain itu, masalah sosial demografis juga harus segera diantisipasi sejak dini untuk mencegah gejala sosial yang pada satu titik dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif bagi penerapan FTZ.

Dari sisi akses, Pulau Batam yang mempunyai luas 415 km² memiliki begitu banyak pelabuhan. Dengan empat pelabuhan ferry internasional, tiga pelabuhan samudra, tiga pelabuhan lokal antar pulau, dan 78 pelabuhan khusus dan kemungkinan 97 pelabuhan ilegal yang dikenal "pelabuhan tikus" menjadikan Kota Batam sebagai daerah yang sangat terbuka.

Sebagai kota pantai dan kota perbatasan sekaligus, Batam menghadapi permasalahan penyelundupan dan transaksi ekonomi non-registrasi yang cukup kompleks. Diferensiasi mata uang (misalnya dollar Singapura dan Rupiah) yang diikuti permintaan tinggi terhadap barang-barang konsumsi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan. Hal tersebut diperkuat dengan kedekatan jarak, akses yang lancar dan harga yang murah membuat potensi penyelundupan semakin tinggi di Kota Batam. Faktor kelemahan birokrasi juga dapat membuat Kota Batam menjadi kota yang semakin rentan terhadap penyelundupan.

Kedekatan geografis Kota Batam dengan Singapura ikut mempengaruhi peningkatan transaksi ekonomi non-registrasi di Kota Batam. Jika ditarik dari aspek historis, Singapura memang telah lama menjadi pelabuhan bebas semenjak zaman kesultanan Melayu sebagai "*colonial free entreport*". Hal tersebut mau tidak mau mempengaruhi model ekonomi satelit di Kota Batam. Perputaran roda ekonomi Singapura berimbas sampai ke Kota Batam baik dalam transaksi legal maupun ilegal.

**TABEL 1. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2007 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2006				2007	
	Trw.I	Trw.II	Trw.III	Trw.IV	Trw.I	Trw.II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	578,142.99	591,645.21	609,684.23	590,533.65	602,883.19	629,642.04
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	34,619.11	34,619.11	32,028.31	22,171.48	33,734.79	33,721.93
b. Perkebunan	35,073.77	36,567.16	42,954.22	38,774.01	39,165.77	37,823.13
c. Peternakan	90,136.94	92,924.82	91,991.50	93,973.65	94,265.04	97,924.20
d. Kehutanan	7,648.92	7,898.51	7,538.28	7,364.37	7,648.92	7,675.64
e. Perikanan	410,664.25	419,635.61	435,171.92	428,250.14	428,068.66	452,497.14
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,181,518.99	1,212,007.33	1,232,552.32	1,239,948.54	1,295,395.06	1,303,554.25
a. Pertambangan	1,040,394.35	1,061,483.96	1,079,399.73	1,084,285.08	1,134,387.78	1,144,672.96
b. Pertambangan non migas	89,073.33	96,271.45	98,183.71	99,989.21	103,874.56	102,662.14
c. Penggalian	52,051.30	54,251.92	54,968.88	55,674.25	57,132.72	56,219.15
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,438,488.32	6,656,379.13	6,878,155.81	7,287,063.55	7,497,587.87	7,536,570.35
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	6,438,488.32	6,656,379.13	6,878,155.81	7,287,063.55	7,497,587.87	7,536,570.35
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	33,890.98	34,943.56	35,516.39	36,059.84	37,214.70	38,704.27
a. Listrik	26,406.54	27,356.37	27,897.13	28,373.87	29,437.74	30,668.83
b. Air Bersih	7,484.44	7,587.19	7,619.26	7,685.97	7,776.96	8,035.44
5. BANGUNAN	453,158.26	900,828.39	479,470.23	495,597.69	519,831.94	541,964.43
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	893,056.24	900,828.39	918,265.57	945,375.55	972,980.49	1,019,286.37
a. Perdagangan Besar dan Eceran	770,322.28	773,619.70	787,717.24	809,838.12	831,876.09	868,962.51
b. Hotel	77,132.90	79,995.21	82,556.91	85,689.87	89,031.86	94,258.02
c. Restoran	45,601.06	47,213.48	47,991.42	49,847.56	52,072.54	56,065.84
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	435,870.58	453,107.63	466,956.80	485,640.70	506,146.45	534,660.10
a. Angkutan	388,749.35	405,986.39	414,857.28	428,349.60	446,381.97	470,602.24
b. Komunikasi	47,121.24	47,121.24	52,099.52	57,291.09	59,764.49	64,057.86
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	611,498.39	624,643.71	634,994.37	647,803.45	669,906.77	698,418.08
a. Bank	420,145.49	427,284.95	433,591.11	439,825.54	452,764.11	473,973.53
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	19,876.67	20,169.31	20,720.54	21,442.33	22,104.69	23,125.97
c. Jasa Penunjang	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	166,953.80	172,478.14	175,887.07	181,637.23	189,908.05	195,853.42
e. Jasa Perusahaan	4,522.43	4,711.31	4,795.65	4,898.35	5,129.92	5,465.15
9. JASA - JASA	254,733.83	264,204.79	273,644.74	283,472.72	296,385.12	312,311.24
P D R B	10,880,358.58	11,209,941.06	11,529,240.46	12,011,495.68	12,398,331.60	12,616,111.12

Sumber : BPS Batam

**TABEL 2. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2007 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2006				2007	
	Trw.I	Trw.II	Trw.III	Trw.IV	Trw.I	Trw.II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	378,314.54	385,684.79	396,979.93	381,385.23	384,956.85	399,002.69
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	23,019.89	22,915.49	21,515.25	14,856.74	21,564.54	21,354.11
b. Perkebunan	19,358.26	20,167.66	23,652.37	21,211.56	21,943.32	20,689.54
c. Peternakan	58,064.17	59,552.94	59,068.33	60,259.21	60,729.55	62,358.76
d. Kehutanan	5,716.29	5,781.47	5,389.84	5,221.43	5,045.68	5,052.97
e. Perikanan	272,155.92	277,267.23	287,354.14	279,836.29	275,673.76	289,547.37
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	524,705.03	532,542.17	539,292.08	542,617.78	552,920.54	556,105.51
a. Pertambangan	447,788.08	451,516.83	457,317.25	459,125.13	467,215.76	472,321.08
b. Pertambangan non migas	44,104.33	47,324.21	48,019.56	49,225.23	50,776.65	49,853.29
c. Penggalian	32,812.62	33,701.13	33,955.27	34,267.42	34,928.13	33,931.14
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,342,551.90	5,455,945.06	5,544,603.95	5,551,424.67	5,661,814.98	5,669,432.17
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	5,342,551.90	5,455,945.06	5,544,603.95	5,551,424.67	5,661,814.98	5,669,432.17
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	18,288.26	18,778.90	18,842.41	19,059.62	19,257.20	19,695.06
a. Listrik	15,202.61	15,651.13	15,702.46	15,913.75	16,091.87	16,497.60
b. Air Bersih	3,085.65	3,127.77	3,139.95	3,145.87	3,165.33	3,197.40
5. BANGUNAN	209,025.45	216,832.84	219,971.04	226,754.06	231,735.87	234,523.60
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	630,612.82	635,410.85	646,844.24	664,218.49	678,952.27	701,239.26
a. Perdagangan Besar dan Eceran	539,529.91	541,607.16	550,985.27	565,542.11	576,712.65	593,931.60
b. Hotel	60,082.47	62,172.60	63,834.85	65,543.60	67,987.64	71,543.20
c. Restoran	31,000.44	31,631.09	32,024.12	33,132.78	34,251.98	35,764.30
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	305,931.92	311,807.20	317,240.12	326,883.97	333,534.08	342,939.48
a. Angkutan	270,710.30	275,467.08	280,383.61	287,476.19	293,017.77	300,781.60
b. Komunikasi	35,221.62	36,340.12	36,856.51	39,407.78	40,516.31	42,157.80
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	351,905.08	358,225.02	363,784.40	370,113.28	378,450.50	399,142.50
a. Bank	237,159.82	240,681.13	243,971.54	246,778.98	251,898.33	260,136.60
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	12,422.04	12,963.23	13,303.12	13,705.32	13,909.54	14,203.10
c. Jasa Penunjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	100,044.59	102,259.37	104,151.28	107,230.55	110,176.87	112,236.40
e. Jasa Perusahaan	2,278.63	2,321.29	2,358.46	2,398.43	2,465.76	2,566.30
9. JASA - JASA	150,675.71	153,661.46	157,044.13	160,891.07	165,450.87	170,600.00
P D R B	7,912,010.71	8,068,888.29	8,204,602.30	8,243,348.17	8,407,073.16	8,482,680.20

Sumber : BPS Batam

TABEL 3. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Apr'07 s/d Jun'07 (Tahun 2002=100)

Kelompok	April 07		Mei 07		Juni 07	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
UMUM	134.37	-0.02	133.89	-0.36	133.94	0.04
I. BAHAN MAKANAN	140.87	-0.47	138.94	-1.37	138.16	-0.56
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	180.28	-0.66	169.60	-5.92	170.05	0.27
b. Daging dan hasil-hasilnya	115.53	0.00	116.03	0.43	114.95	-0.93
c. Ikan segar	145.88	-1.18	146.76	0.60	144.29	-1.68
d. Ikan diawetkan	132.99	0.20	133.64	0.49	133.70	0.04
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	115.09	1.53	115.83	0.64	116.19	0.31
f. Sayuran	164.47	3.36	165.32	0.52	149.80	-9.39
g. Kacang-kacangan	121.48	1.17	122.26	0.64	121.92	-0.28
h. Buah-buahan	131.52	1.83	131.77	0.19	131.37	-0.30
i. Bumbu-bumbuan	132.94	-9.31	116.75	-12.18	124.59	6.72
j. Lemak dan minyak	135.98	1.63	149.09	9.64	156.19	4.76
k. Bahan makanan lainnya	132.53	0.05	132.53	0.00	132.98	0.34
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	135.39	-0.17	135.51	0.09	135.98	0.35
a. Makanan jadi	135.31	0.09	135.32	0.01	135.53	0.16
b. Minuman yang tidak beralkohol	129.88	-1.34	129.19	-0.53	129.44	0.19
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	138.04	0.00	138.68	0.46	139.60	0.66
III. PERUMAHAN	121.41	0.41	121.50	0.07	122.05	0.45
a. Biaya tempat tinggal	112.70	0.58	112.70	0.00	112.71	0.01
b. Bahan bakar, penerangan dan air	149.08	0.00	149.13	0.03	151.19	1.38
c. Perlengkapan rumah tangga	112.61	0.96	112.78	0.15	112.90	0.11
d. Penyelenggara rumah tangga	112.28	0.46	113.06	0.69	113.52	0.41
IV. SANDANG	115.84	0.60	115.46	-0.33	115.61	0.13
a. Sandang laki-laki dewasa	104.53	0.07	104.53	0.00	104.62	0.09
b. Sandang wanita dewasa	103.32	0.47	103.37	0.05	103.44	0.07
c. Sandang anak-anak	106.12	0.08	106.12	0.00	106.43	0.29
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	182.14	1.90	179.42	-1.49	179.59	0.09
V. KESEHATAN	110.12	0.32	110.51	0.35	110.77	0.24
a. Jasa kesehatan	115.18	0.00	115.18	0.00	115.18	0.00
b. Obat-obatan	112.95	0.00	113.06	0.10	113.06	0.00
c. Jasa Perawatan Jasmani	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	107.51	0.56	108.16	0.60	108.59	0.40
VI. PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA	139.48	-0.11	139.48	0.00	139.71	0.16
a. Jasa Pendidikan	178.96	-0.26	178.96	0.00	178.96	0.00
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	107.09	0.00	107.09	0.00	108.93	1.72
d. Rekreasi	112.61	0.12	112.61	0.00	112.61	0.00
e. Olahraga	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
VII. TRANSPOR & KOMUNIKASI	155.96	0.02	155.96	0.00	155.96	0.00
a. Transpor	179.02	0.03	179.02	0.00	179.02	0.00
b. Komunikasi dan pengiriman	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00
c. Sarana dan penunjang transpor	105.33	0.00	105.33	0.00	105.33	0.00
d. Jasa Keuangan	173.68	0.00	173.68	0.00	173.68	0.00

Sumber : BPS Batam

TABEL 4. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	Q II/04	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05	Q IV/05	Q I/06	Q II/06	Q III/06	Q IV/06	Q I/07	Q II/07
1. Batam	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	14.79	0.66	-0.39	1.34	1.97	1.42	0.04
2. Pekanbaru	3.45	1.30	2.71	2.75	0.14	2.91	17.1	0.73	0.90	1.98	3.35	3.64	-0.01
3. Nasional	2.35	0.49	2.46	3.19	1.05	2.03	17.11	1.98	0.89	1.16	2.41	1.90	2.30

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

TABEL 5. DATA BANK UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dim. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode					
	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Des-06	Mar-07	Jun-07
TOTAL ASSET	10,559,530	12,173,496	13,115,164	14,592,742	14,617,078	15,106,938
DANA PIHAK III	8,552,495	10,250,252	11,134,372	12,420,268	12,462,137	12,795,065
a. Giro	3,429,726	4,435,878	4,988,060	5,086,038	5,057,691	5,602,987
b. Deposito	2,302,858	3,089,243	2,934,752	3,506,054	3,560,426	3,196,346
c. Tabungan	2,819,911	2,725,131	3,211,560	3,828,176	3,844,020	3,995,732
KREDIT						
a. Jenis Penggunaan	5,771,562	6,118,262	6,258,180	6,666,355	6,713,064	7,228,680
- Modal Kerja	2,081,520	2,199,868	2,299,214	2,366,633	2,303,606	2,486,151
- Investasi	1,511,012	1,596,120	1,528,315	1,758,377	1,764,400	1,894,140
- Konsumsi	2,179,030	2,322,274	2,430,651	2,541,345	2,645,058	2,848,389
b. Golongan Kredit	5,771,562	6,118,262	6,258,180	6,666,355	6,713,064	7,228,680
- KUK	733,613	745,690	660,367	721,815	736,524	868,988
- Non KUK	5,037,949	5,372,572	5,597,813	5,944,540	5,976,540	6,359,692
b. Jenis Kredit	5,771,562	6,118,262	6,258,180	6,666,355	6,713,064	7,228,680
- UMKM	3,157,413	3,311,625	3,447,910	3,732,440	3,824,333	4,098,528
- Non UMKM	2,614,149	2,806,637	2,810,270	2,933,915	2,888,731	3,130,152
c. Kolektibilitas	5,771,562	6,118,262	6,258,180	6,666,355	6,713,064	7,228,680
- Lancar	4,650,364	4,957,027	4,978,457	5,658,971	5,658,159	6,179,304
- D.P.Khusus	789,573	801,847	878,791	718,327	755,618	739,891
- Kurang Lancar	22,604	43,229	113,297	51,033	43,591	91,848
- Diragukan	52,004	40,739	30,406	28,018	38,974	46,772
- Macet	257,017	275,420	257,229	210,006	2,216,722	170,865
RATIO						
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	67.48%	59.69%	56.21%	53.67%	53.87%	56.50%
b. Non Performing Loans (NPL)	5.75%	5.87%	6.41%	4.34%	34.25%	4.28%
c. Penyaluran KUK	12.71%	12.19%	10.55%	10.83%	10.97%	12.02%
b. Penyaluran UMKM	54.71%	54.13%	55.09%	55.99%	56.97%	56.70%

Sumber : Bank Indonesia Batam

**TABEL 6. DATA BANK UMUM
WILAYAH KEPULAUAN RIAU *)**

Dlm. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode							
	Sep-05	Des-05	Mar-06	Jun-06	Sept-06	Des-06	Mar-07	Jun-07
TOTAL ASSET	1,714,569	1,692,934	2,025,803	2,505,748	2,752,076	3,148,553	4,411,406	4,138,592
DANA PIHAK III	1,756,648	1,896,659	2,437,201	2,373,852	3,527,586	4,441,093	4,302,828	4,472,058
a. Giro	637,206	690,472	935,856	925,238	1,799,219	1,750,407	1,593,936	1,903,262
b. Deposito	184,974	146,402	459,923	544,678	649,991	1,258,970	1,409,571	1,227,705
c. Tabungan	934,468	1,059,785	1,041,422	903,936	1,078,376	1,431,716	1,299,321	1,341,091
KREDIT								
a. Jenis Penggunaan	296,024	116,251	739,121	741,651	991,558	1,077,505	1,090,551	1,202,837
- Modal Kerja	240,065	186,747	325,025	306,969	342,744	398,016	371,052	429,443
- Investasi	45,364	(131,041)	149,391	155,244	181,457	188,952	195,943	204,834
- Konsumsi	10,595	60,545	264,705	279,438	467,357	490,537	523,556	568,560
b. Golongan Kredit	296,024	116,251	739,121	741,651	991,558	1,077,505	1,090,551	1,202,837
- KUK	172,276	190,331	165,491	156,478	219,646	235,960	226,598	294,463
- Non KUK	123,748	(74,080)	573,630	585,173	771,912	841,545	863,953	908,374
b. Jenis Kredit	296,024	116,251	739,121	741,651	991,558	1,077,505	1,090,551	1,202,837
- UMKM	235,385	289,039	514,989	508,797	2,183,879	774,145	801,835	880,751
- Non UMKM	60,639	(172,788)	224,132	232,854	(1,192,321)	303,360	288,716	322,086
c. Kolektibilitas	296,024	116,251	739,121	741,651	991,558	1,077,505	3,090,551	1,202,837
- Lancar	527,618	258,471	613,762	595,463	801,294	888,732	882,570	1,000,021
- D.P Khusus	(163,260)	(136,854)	37,822	53,146	72,340	147,365	144,434	134,748
- Kurang Lancar	(23,605)	(4,731)	413	2,941	86,919	14,740	21,240	12,032
- Diragukan	22,184	8,694	11,768	10,139	3,883	6,798	11,138	21,685
- Macet	(66,913)	(9,329)	75,356	79,962	27,122	19,870	2,031,169	34,351
RATIO								
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	16.85%	6.13%	30.33%	31.24%	28.11%	24.26%	25.34%	26.90%
b. Non Performing Loan (NPLs)	-23.08%	-4.62%	11.84%	12.55%	11.89%	3.84%	66.77%	5.66%
c. Penyaluran KUK	58.20%	163.72%	22.39%	21.10%	22.15%	21.90%	20.78%	24.48%
d. Penyaluran UMKM	79.52%	248.63%	69.68%	68.60%	220.25%	71.85%	73.53%	73.22%

Sumber : Bank Indonesia Batam

*) meliputi Tj. Pinang, Tj. Balai Karimun, Natuna

**TABEL 7. DATA BANK UMUM
KOTA BATAM**

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode							
	Sep.2005	Des-05	Mar.2006	Jun 2006	Sep-06	Des-06	Mar-07	Jun-07
TOTAL ASSET	#####	#####	#####	#####	#####	#####	10,181,336	10,478,486
DANA PIHAK III	#####	#####	#####	#####	#####	#####	8,159,309	8,323,007
a. Giro	2,492,805	2,588,702	2,504,488	2,991,265	3,188,841	3,335,631	3,463,755	3,699,725
b. Deposito	1,659,129	1,709,368	1,758,180	2,099,628	2,284,761	2,247,084	2,150,855	1,968,641
c. Tabungan	2,072,367	1,971,878	1,915,975	2,106,597	2,133,184	2,396,460	2,544,699	2,654,641
KREDIT								
a. Jenis Penggunaan	#####	#####	#####	#####	#####	#####	5,622,513	6,025,843
- Modal Kerja	1,662,105	1,812,894	1,774,551	1,876,439	1,956,470	1,968,617	1,932,554	2,056,708
- Investasi	1,564,101	1,488,503	1,355,768	1,428,990	1,346,858	1,569,425	1,568,457	1,689,306
- Konsumsi	1,761,916	1,836,881	1,899,592	1,997,177	1,963,294	2,050,808	2,121,502	2,279,829
b. Golongan Kredit	#####	#####	#####	#####	#####	#####	5,622,513	6,025,843
- KUK	597,065	560,147	577,135	581,187	440,721	485,855	509,926	574,525
- Non KUK	4,391,057	4,578,131	4,452,776	4,721,419	4,825,901	5,102,995	5,112,587	5,451,318
b. Jenis Kredit	#####	#####	#####	#####	#####	#####	5,622,513	6,025,843
- UMKM	2,539,087	2,592,954	2,648,616	2,768,363	1,264,031	2,958,295	3,022,498	3,217,777
- Non UMKM	2,449,035	2,545,324	2,381,295	2,534,243	4,002,591	2,630,555	2,600,015	2,808,066
c. Kolektibilitas	#####	#####	#####	#####	#####	#####	5,622,513	6,025,843
- Lancar	4,029,741	4,230,611	4,054,901	4,281,312	4,177,163	4,770,239	4,775,589	5,179,283
- D.P. Khusus	742,746	642,231	736,427	775,283	806,451	570,962	611,184	605,143
- Kurang Lancar	51,316	86,261	19,663	29,270	26,378	36,293	22,351	79,816
- Diragukan	24,868	11,953	41,865	26,275	26,523	21,220	27,836	25,087
- Macet	139,451	167,222	177,055	190,466	230,107	190,136	185,553	136,514
RATIO								
a. <i>Loan to Dept Ratio (LDR)</i>	80.14%	81.95%	81.41%	73.67%	69.24%	70.04%	68.91%	72.40%
b. <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	4.32%	5.17%	4.74%	4.64%	5.37%	4.43%	4.19%	4.01%
c. Penyaluran KUK	11.97%	10.90%	11.47%	10.96%	8.37%	8.69%	9.07%	9.53%
d. Penyaluran UMKM	50.90%	50.46%	52.66%	52.21%	24.00%	52.93%	53.76%	53.40%

Sumber : Bank Indonesia Batam
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 8. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR
DAN KEGIATAN PEMBERIAN TANDA TIDAK BERHARGA (PTTB)
KANTOR BANK INDONESIA BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462,953.66	2,635,234.81	398,055.62
2	Tahun 2001	629,831.60	2,987,016.25	239,678.80
3	Tahun 2002	1,033,638.93	2,549,992.51	452,865.93
4	Tahun 2003	1,495,116.25	2,484,657.11	788,860.84
5	Trw. I 2004	482,275.13	581,277.17	260,294.19
6	Trw. II 2004	411,464.39	891,148.36	312,121.60
	Trw. IV 2004	539,764.19	1,339,736.86	308,784.92
7	Tahun 2004	1,916,806.75	3,649,307.28	1,294,656.53
	Trw. I 2005	640,230.81	926,990.06	409,223.23
	Trw. II 2005	544,737.73	999,525.99	252,284.87
	Trw. III 2005	499,380.25	1,013,848.73	133,242.75
8	Januari 2006	264,207.72	257,567.63	67,711.87
	Februari 2006	269,475.86	278,910.89	65,945.72
	Maret 2006	270,355.37	397,274.49	71,261.43
	Trw. I 2006	804,038.95	933,753.01	204,919.02
9	April 2006	259,239.21	289,319.31	86,798.58
	Mei 2006	96,796.99	255,199.80	28,321.03
	Juni 2006	60,424.38	309,874.21	16,302.79
	Trw. II 2006	416,460.58	854,393.15	131,422.41
10	Juli 2006	107,594.32	208,750.69	41,043.63
	Agustus 2006	75,633.01	180,680.87	25,709.93
	September 2006	52,102.99	296,627.42	24,550.11
	Trw.III 2006	235,330.32	686,058.98	91,303.67
11	Oktober 2006	85,386.48	566,756.20	15,326.60
	November 2006	153,597.90	117,756.21	77,549.63
	Desember 2006	13,933.54	450,008.64	15,326.60
	Trw.IV 2006	252,917.92	1,134,521.05	108,202.83
12	Januari 2007	80,529.98	68,103.18	22,192.11
	Februari 2007	16,412.91	103,517.88	16,804.76
	Maret 2007	23,766.94	194,126.92	21,058.78
	Trw.I 2007	120,709.83	365,747.98	60,055.65
13	April 2007	18,277.29	122,738.58	19,402.59
	Mei 2007	21,708.20	191,526.65	16,529.84
	Juni 2007	20,563.62	188,673.62	5,298.76
	Trw. II 2007	60,549.11	502,938.85	41,231.19

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 9. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.I/2006		Trw.II/2006		Trw.III/2006		Trw.IV/2006		Trw.I/2007		Trw.II/2007	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING												
1. WARKAT (Lbr)	146,241	2,359	154,662	2,535	134,863	2,141	103,808	1,759	104,613	1,687	108,413	1,749
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2,168,735	34,980	2,734,433	44,827	2,584,609	41,026	2,437,397	41,312	2,297,292	37,053	2,267,885	36,579
B. TOLAKAN KLIRING												
1. CEK KOSONG												
- Lembar	323	5	327	5	339	5	399	7	297	5	255	4
- Nominal (Jt.Rp)	18,482	298	6,654	109	7,384	117	13,912	236	7,683	124	6,314	102
2. BG. KOSONG												
- Lembar	537	9	685	11	517	8	486	8	393	6	366	6
- Nominal (Jt.Rp)	10,936	176	13,270	218	7,122	113	9,664	164	10,800	174	27,413	442
3. ALASAN LAIN												
- Lembar	528	9	491	8	568	9	738	13	759	12	774	12
- Nominal (Jt.Rp)	9,567	154	7,802	128	6,889	109	10,035	170	15,402	248	86,823	1,400
4. TOTAL TOLAKAN												
- Lembar	1,388	22	1,503	25	1,424	23	1,623	28	1,449	23	1,395	23
- Nominal (Jt.Rp)	38,985	629	27,725	455	21,826	346	33,611	570	33,885	547	120,549	1,944

Sumber : Bank Indonesia Batam